

Dunia Jurnalisme dan Profesi Wartawan

Yadi Sastro, S.Si.
Edi Sudarjat, S.I.B.



PENDAHULUAN

Sebenarnya, apabila mengacu pada kaidah bahasa Indonesia, kata *S* jurnalistik kurang tepat digunakan. Namun, kata ini sudah lama dipakai dan menjadi sejarah. Indonesia mengenal bidang ilmu publisistik yang sekarang dikenal sebagai ilmu komunikasi. Kata jurnalisme lebih tepat digunakan sebagai ganti kata jurnalistik yang merupakan sebuah keterampilan dan berada di bawah naungan ilmu komunikasi.

Publisistik secara sejarah lahir dari Jerman (*publizistik*). Kampus yang berkiblat ke Eropa menggunakan kata ini, sedangkan, yang berkiblat ke Amerika menggunakan kata jurnalistik meski Amerika menggunakan *journalism*. Kata publisistik tidak dikenal di sana. Belanda yang memengaruhi pendidikan Indonesia menggunakan *publicistiek* dan juga memiliki kata *journalistiek*. Bahasa Inggris mengenal kata *journalistic*, selain *journalism*.

Pengaruh sejarah (baca: Belanda) dan serapan itulah yang membuat kata jurnalistik tidak menjadi masalah dan lazim meskipun ada upaya untuk dihindari dan sedapat mungkin menggunakan kata jurnalisme. Istilah 'jurnalistik' sudah cukup populer. Ada yang mengatakan jurnalistik itu kata sifat, sedangkan kata bendanya adalah 'jurnalisme'. Kata sifat jurnalistik sudah salah kaprah menjadi kata benda, terutama dipakai pada periode sebelum 1990-an. Mari kita kembalikan kata itu pada fungsinya (Ecip, 2007: 5). Untuk tujuan pembahasan di modul ini, kita gunakan kata jurnalisme.

Dunia jurnalisme dan kewartawanan tidak sesederhana yang dibayangkan. Di tengah masyarakat, banyak yang menilai bahwa pekerjaan wartawan itu rendah, tidak menarik, dan tidak bergengsi, apalagi kalau pekerjaan wartawan diukur dengan rupiah. Sering terdengar ungkapan sinis,

“Menjadi wartawan itu tidak bisa menghasilkan banyak uang. Jangan ambil menantu wartawan”. Akan tetapi, akhir-akhir ini banyak media, tidak hanya media cetak, adalah perusahaan besar. Gaji karyawannya cukup tinggi. Pekerjaan wartawan, terutama yang berada di media besar atau anggota grup perusahaan, tidak lagi dipandang sebelah mata.

Mengikuti perkembangan teknologi, banyak yang menganggap profesi wartawan itu sangat menarik, menantang, dan sangat terhormat. Seorang wartawan dengan penuh tanggung jawab senantiasa mengutamakan kepentingan orang banyak dalam melaksanakan tugasnya. Betapa banyak wartawan harus rela kehilangan nyawa semata-mata demi tugas dan tanggung jawabnya.

Menyebut satu contoh saja adalah Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin, wartawan *Harian Bernas* yang luar biasa. Meski ia bekerja di surat kabar lokal di Yogyakarta dan mungkin kecil skala bisnisnya, ia mampu menorehkan namanya ke pentas nasional, bahkan internasional. Keberanian Udin mengungkap dugaan korupsi Kolonel Sri Roso Sudarmo, bupati Bantul waktu itu, terkait dana inpres desa tertinggal (IDT), membuatnya terbunuh. Pada Selasa malam, 13 Agustus 1996, ia didatangi dan dianiaya orang tak dikenal di depan rumahnya. Udin koma dan meninggal tiga hari kemudian. Kasus kematian Udin belum berhasil diungkap hingga kini.

Media memang memiliki kemampuan. Apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting oleh publik. Di situlah, jurnalisme, pers (salah satu lembaga pelaksana media), dan kerja jurnalisme memiliki peran penting. Tak jarang pula, pers menjadi alat kepentingan politik tertentu. Ada suasana yang bisa diciptakan lewat pemberitaan di pers sehingga menguntungkan kelompok tertentu.

Pers adalah perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan jurnalisme. Sementara itu, jurnalisme adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, sampai memublikasikan informasi dengan cara yang sudah baku. Surat kabar, majalah, radio, televisi, dan internet yang melakukan kegiatan jurnalisme adalah pers. Orang yang tugasnya di bidang jurnalisme adalah wartawan.

Salah satu fungsi jurnalisme adalah bertanggung jawab dan bertujuan membuat orang lain tahu. Fungsi memberi informasi ini yang dengan cerdas akan dimanfaatkan pihak tertentu untuk bertindak sebagai pemasok berita agar diketahui kawan ataupun lawan.

Di sisi *audience* (pembaca/pendengar/pemirsa), berlaku hukum alam bahwa secara naluriah setiap individu cenderung ingin mengetahui sesuatu

yang terkait diri dan lingkungannya. Itulah sebabnya media/pers/jurnalisme sangat dibutuhkan orang.

Sisi positifnya, pada era Reformasi, pers membuat masyarakat dapat menikmati keterbukaan dan demokratisasi. Jadi, sampai kapan pun jurnalisme dan pers tidak bisa dianggap remeh meskipun di Indonesia kesejahteraan wartawan masih dianggap rendah.

Sementara itu, negara-negara maju menjunjung tinggi pers dan profesi wartawan karena mereka sadar akan peran pers. Tak ada kemajuan tanpa ada peran media. Sebagaimana diakui James Russel Wiggin, pemimpin redaksi *The Washington Post*, peradaban ini tidak dapat muncul jika tidak ada fasilitas bagi penyebaran berita (Departemen Luar Negeri AS, *Pers Tak Terbelenggu*, 2004: 7). Peradaban Mesir Kuno, peradaban Arya di sepanjang aliran Sungai Indus di India, dan peradaban Islam di Baghdad berkembang karena didukung oleh penyebaran berita, khususnya tentang ilmu dan kebudayaan yang dikembangkannya.

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat memahami dan menjelaskan:

1. sejarah singkat jurnalisme,
2. pengertian jurnalisme dan hubungannya dengan pers,
3. perkembangan profesi wartawan,
4. fungsi dan peran wartawan,
5. persyaratan menjadi wartawan,
6. kode etik jurnalisme.

Modul ini sebaiknya dibaca dan dipelajari secara berurutan agar pengertian mengenai dunia jurnalisme dan profesi wartawan diperoleh dengan menyeluruh. Jika Anda tertarik mengenai dunia kewartawanan, tentu Anda memulai dari subbab ketiga hingga subbab terakhir, baru kemudian mempelajari subbab pertama dan kedua.

KEGIATAN BELAJAR 1

Sejarah dan Lingkup Pekerjaan Jurnalisme

A. SEKILAS SEJARAH JURNALISME

Di Indonesia, pada mulanya dikenal dua istilah untuk maksud yang sama: publisistik dan jurnalistik. Dua istilah ini dapat dipertukarkan karena hanya berbeda asalnya. Beberapa kampus di Indonesia sempat menggunakan publisistik karena berkiblat ke Eropa. *Publizistik* dikembangkan di Jerman. Seiring waktu, istilah jurnalistik muncul dari Amerika Serikat dan menggantikan publisistik dengan jurnalistik Belanda yang kuat memengaruhi pendidikan di Indonesia, selain menggunakan kata *publicistiek*, juga menggunakan kata *journalistiek*.

Meskipun sama, publisistik sempat juga dibedakan dari jurnalistik. Dalam buku *Publisistik dan Jurnalistik*, Adinegoro menyatakan, “Jurnalistik adalah kepandaian yang praktis, sedangkan publisistik adalah kepandaian yang ilmiah”. Kemudian, Adinegoro juga menyitir pendapat W. Norden dalam *Pers, Propaganda en Openbare Meening* yang berbunyi, “*De Journalistiek is geen wetenschap, doch een ambact, dat zowel op wetenschappelijk als op praktis niveau wordt beoefend en zij blijft daardoor voor outsider 'toegankelijk'.*” Artinya, bahwa jurnalistik bukan suatu ilmu, tetapi suatu kejuruan yang dapat diselenggarakan pada tingkatan ilmiah ataupun praktis. Karenanya, ia selalu merupakan bidang yang terbuka bagi orang luar (Kertapati, 1986: 24).

Perbedaan itu tentu tak muncul di Amerika Serikat karena memang tidak mengenal publisistik. Orang Amerika Serikat menganggap *journalism* atau jurnalistik tidak sebagai kejuruan atau kepandaian praktis di bidang persuratkabaran. Justru, kompleksitas di persuratkabaran hanyalah sebagian dari *journalism*. Amerika menempatkan *journalism* sebagai titik pusat dari kompleksitas komunikasi. Maka dari itu, di Amerika banyak bermunculan *school of journalism* atau *graduate school of journalism*. Kemudian, *journalism* berkembang menjadi *science of communications* atau *science of mass communication*.

Di Indonesia, setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya kata publisistik memang tidak digunakan lagi. Publisistik berubah menjadi ilmu komunikasi. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107/1982 mengatur penyeragaman nama ilmu yang dikembangkan di Indonesia, termasuk ilmu komunikasi.

1. Masa Awal Jurnalistik

Literatur ilmu komunikasi senantiasa menjelaskan bahwa cikal bakal kegiatan jurnalistik dimulai pada zaman Romawi Kuno ketika Julius Caesar berkuasa (100-44 SM). Waktu itu, ia mengeluarkan peraturan agar kegiatan-kegiatan Senat setiap hari diumumkan kepada khalayak dengan ditempel pada semacam papan pengumuman yang disebut dengan *Acta Diurna*.

Khalayak, sebagian besar tuan tanah dan hartawan, yang ingin mengetahui informasi menyuruh budak-budaknya yang bisa membaca dan menulis untuk mencatat segala sesuatu yang terdapat pada *acta diurna*. Dengan perantaraan para pencatat yang disebut *diurnarii*, para tuan tanah dan hartawan tadi mendapatkan berita-berita tentang Senat.

Dari kata *acta diurna* inilah secara harfiah kata jurnalistik berasal, yakni kata *diurnal* yang dalam bahasa Latin berarti “harian” atau “setiap hari.” Kata ini kemudian diadopsi ke bahasa Prancis menjadi *du jour* dan bahasa Inggris *journal* yang berarti “hari”, “catatan harian”, atau “laporan”. Dari kata *diurnarii* muncul kata *diurnalis* dan *journalist* (wartawan).

Di Cina, tercatat bahwa surat kabar terbit pada tahun 911 pada masa Kaisar Quang Soo. Surat kabar ini bernama *King Pau* atau *Tching-Pao* yang berarti kabar istana. Surat kabar ini diterbitkan dengan peraturan khusus dan pengawasan ketat dari kaisar. Seperti halnya *Acta Diurna*, isi surat kabar ini adalah keputusan-keputusan rapat-rapat permusyawaratan dan berita-berita istana. *Tching-Pao* terbit tidak tetap. Baru pada tahun 1351 Surat kabar ini terbit seminggu sekali secara teratur.

Dunia persuratkabaran mengalami revolusi setelah ditemukannya mesin cetak oleh Johan Guttenberg pada tahun 1450. Segera informasi yang dicetak berkembang di mana-mana, tetapi belum muncul cetakan yang memenuhi syarat sebagai surat kabar, terutama syarat periodisasinya, ataupun bentuknya. Publikasi tercetak di masa awal itu sifatnya masih insidental, dalam format kuarto, dan banyak yang dicetak secara gelap. Jadi, masih berupa pamflet. Ada yang menyebutkan, berkat mesin cetak Guttenberg, muncul koran pertama pada tahun 1457 di Nurenberg, Jerman. Salah satu

peristiwa besar yang pertama kali diberitakan secara luas di surat kabar adalah pengumuman hasil ekspedisi Christopher Columbus ke Benua Amerika pada tahun 1493.

Dalam perkembangan berikutnya, pada abad ke-17, kaum bangsawan di Inggris umumnya memiliki penulis-penulis yang membuat berita untuk kepentingan sang bangsawan. Para penulis itu membutuhkan suplai berita. Organisasi pemasok berita (sindikat wartawan atau penulis) bermunculan bersama maraknya jumlah koran yang diterbitkan. Pada waktu yang hampir bersamaan, koran-koran eksperimental, (yang bukan berasal dari kaum bangsawan), mulai pula diterbitkan terutama di Prancis.

Berdasarkan berbagai penelaahan, sejarah jurnalistik menempatkan surat kabar yang diterbitkan pertama kali adalah *Relation* atau lengkapnya *Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien*. Surat kabar ini diterbitkan oleh keluarga Johan Carolus (1575—1634) di Kota Strasbourg, yang memiliki status kota bebas kekaisaran dalam Kekaisaran Roma Suci Bangsa Jerman.

Pada 2005, World Association of Newspapers atau Asosiasi Surat Kabar Dunia memberikan pengakuan bahwa pamflet milik Carolus dicetak mulai tahun 1605, bukan tahun 1609 seperti yang selama ini diperkirakan. Petisi Carolus yang ditemukan di arsip *Strasbourg Municipal* pada tahun 1980 dapat dikatakan sebagai awal terbitnya surat kabar.

Surat kabar pertama sebagaimana yang kita kenal sekarang dan terbit setiap hari adalah *Leipziger Zeitung*, yang hadir di Kota Leipzig pada tahun 1660. Jerman boleh dibilang pelopor surat kabar. Sebelum tahun 1640, Jerman telah memiliki 24 surat kabar tercetak. Selanjutnya, muncul surat kabar harian di negara lain, seperti *Daily Currant* di Inggris tahun 1702, *Journal de Paris* (Prancis, 1777), *Daily Advertiser* (Philadelphia, Amerika Serikat, 1784), *Algemeen Handelsblad* (Belanda, 1830), dan *Sourabaja Courant* (Hindia Belanda/Indonesia di zaman penjajah, 1837) (Kertapati, 1986: 48-49).

2. Kelahiran Jurnalistik secara Akademis

Secara akademis, jurnalistik pertama kali muncul di Universitas Bazle, Swiss, pada 1884 dengan nama *Zeitungskunde*. Karl Bucher (1847-1930), seorang ahli ekonomi bermazhab Jerman, adalah salah satu orang yang berjasa dalam lahirnya bidang ilmu tersebut. Perhatiannya terhadap

Zeitungskunde bermula dari pengaruh pekerjaannya sebagai wartawan dan redaktur ekonomi pada surat kabar *Frankfurter Zeitung*.

Pengabdianannya dalam dunia pers terus berlanjut. Pada 1892, Bucher kembali ke Jerman dan memberikan kuliah di Universitas Leipzig dalam mata kuliah *Zeitungskunde*. Kuliahnya meliputi sejarah pers, organisasi pers, dan statistik pers.

Nama Bucher selalu melekat hampir dalam setiap perbincangan tentang pers dan jurnalistik, khususnya dalam kerangka ilmu yang dikembangkan melalui lembaga pendidikan atau pelatihan. Beberapa jasa monumental Bucher sebagai berikut (Kertapati, 1986: 21).

1. Untuk pertama kalinya, ia melakukan penyelidikan historis di bidang persuratkabaran.
2. Untuk pertama kalinya, ia mengajarkan pengetahuan persuratkabaran di kalangan masyarakat akademis.
3. Salah seorang pendiri sebuah lembaga persuratkabaran yang pertama di Eropa, yaitu *Leipzig*.

Selain Bucher, sejarah pers juga mencatat peran penting Max Weber (1864-1920). Sebagai sosiolog, dia adalah orang pertama yang melakukan penelitian sosiologis terhadap problem persuratkabaran. Dengan “pisau” analisis sosiologis di tangannya, Weber berhasil membuat generalisasi yang sangat penting dalam pengembangan teori dan praktik jurnalistik. Lewat karyanya *Soziologie des Zeitungswens*, Weber mengemukakan dua hal pokok yang menarik:

1. soal modal dan pengaruh para pemilik modal kepada redaksi,
2. sifat kelembagaan (*institution character*) dari surat kabar.

Dengan demikian, sejak fase *Zaeitungskunde* Max Weber telah menyinggung pertentangan abadi, yang selalu mungkin timbul di antara pihak redaksi dan direksi (Kertapati, 1981: 22). Sementara itu, kajiannya tentang *institution character* menjadi dasar sistem anonimitas (tanpa menyebut nama wartawan) dan *by line* (menyertakan nama wartawan) dalam penulisan berita.

Tahun 1925, perkembangan ilmu jurnalistik memasuki fase kedua. Sebutan ilmu itu berubah menjadi *zeitungswissenschaft* (ilmu tentang persuratkabaran). Kualitas ilmu jurnalistik ditingkatkan. Ilmu ini semakin sistematis dengan dukungan ilmu-ilmu yang terkait, seperti sosiologi,

psikologi, ekonomi, dan politik. Ribuan karya ilmiah dilahirkan. Bahkan, pada tahun 1928, sudah ada 500 disertasi yang mengangkat tema utama seputar problem persuratkabaran di Eropa.

Munculnya radio, film, dan televisi membuat istilah *zeitungswissenschaft* tak memadai lagi. Gagasan untuk mengganti *zeitungswissenschaft* dengan *publizistik* pun muncul. Pada waktu itu, kekuatan pengaruh publisistik sudah mulai diperhitungkan. Fungsinya dapat dieksploitasi untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan dan menindas pihak yang berseberangan. Di awal pertumbuhannya di Jerman, *publizistik* berhadapan dengan ideologi nazisme yang memang sangat kuat. Fungsi publisistik diselewengkan, semata-mata untuk mendukung kepentingan politik Nazi yang dipimpin Hitler. Usai Perang Dunia II, *publizistik* dibersihkan dari unsur-unsur politik yang disusupkan Hitler tersebut.

Di Amerika Serikat lain lagi ceritanya. Istilah publisistik hampir tidak dikenal. Untuk menamai kegiatan persuratkabaran, baik sebagai ilmu maupun sebagai penyebaran berita, orang Amerika Serikat menggunakan istilah *journalism*. Era persuratkabaran di Amerika Serikat mulai berkembang sejak tahun 1690. Saat itu, terbit surat kabar dalam bentuk yang modern, *Public Occurrences both Foreign and Domestic* di Boston yang dimotori oleh Benjamin Harris.

Sebagaimana di Eropa yang mengalami lika-liku, di Amerika *journalism* baru terlembaga dengan baik pada awal abad ke-20. Tokoh penting yang memperjuangkan pendidikan *journalism* secara akademis adalah Joseph Pulitzer (1847-1911). Pulitzer sebetulnya menjadi besar bukan dalam praktik, tetapi karena ia berpikiran maju. Dalam tulisannya yang berjudul *The College of Journalism* tahun 1904, ia mengemukakan gasasan menarik untuk memberikan pendidikan yang cukup tinggi bagi wartawan yang berkualitas. Ia tetap berpendirian bahwa untuk menjadi seorang wartawan yang baik, selain memiliki bakat, terutama harus memiliki pendidikan yang cukup baik. Kecakapan dapat diperoleh dengan jalan pendidikan yang baik (Kertapati, 1986: 35).

Pendidikan jurnalistik di Amerika Serikat mulai berkembang dengan berdirinya School of Journalism pada 1912 di Columbia University, setahun setelah penggagas pertamanya Joseph Pulitzer meninggal dunia. Sejak itu, jurnalistik di negeri Paman Sam, sebutan untuk Amerika Serikat, berkembang pesat, terutama karena didukung oleh lembaga pendidikan profesi secara khusus. Belakangan hari, kita kenal penghargaan tahunan

bergengsi Pulitzer yang dianugerahkan antara lain untuk karya jurnalisme terbaik di Amerika Serikat.

3. Jurnalisme di Indonesia

Sejarah persuratkabaran di Indonesia juga bisa dirunut ke abad XVII, yaitu pada masa Hindia Belanda. Pada waktu itu, berita-berita dari Eropa yang sampai Batavia disusun oleh kantor Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen dalam bentuk tulisan tangan dan selanjutnya dikirim, antara lain, ke Ambon. Berita ini bertajuk *Memorie de Nouvelles* (sekitar tahun 1615). Baru pada 7 Agustus 1744 terbit koran pertama bersama *Bataviasche Nouvelles*. Ini adalah koran resmi pemerintahan Gubernur Jenderal van Imhoff. Pada tahun 1776, di Batavia terbit surat kabar *Vendu Niews* yang berita utamanya mengenai pelelangan. Ketika Inggris berhasil mencaplok Hindia Timur pada 1811, terbit koran berbahasa Inggris *Java Government Gazzete* (awal 1812).

Dua tahun kemudian, Belanda berkuasa lagi dan meneruskan koran lamanya. Namun, namanya diubah menjadi *Bataviasche Courant*. Pada 1829, koran ini berganti nama lagi menjadi *Javasche Courant* yang terbit tiga kali seminggu. Koran ini memuat pengumuman-pengumuman resmi, peraturan-peraturan, dan keputusan pemerintah.

Pada kurun yang sama, terbit pula sejumlah surat kabar di berbagai kota di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi. Satu di antaranya adalah surat kabar yang dikenal memiliki semangat kritis terhadap keputusan politik Belanda, *De Locomotief*. Surat kabar ini terbit di Semarang pada 1851 dan memiliki pengaruh cukup besar, khususnya bagi pembaruan politik kolonial, *politik etik*. Salah seorang wartawannya ialah Ernest Douwes Dekker alias Dr. Danudirdja Setiabudhi yang menjadi tokoh penggerak kebangkitan nasional Indonesia (Muhtadi, Asep Saeful, 1999: 21). Kakek Ernest adalah Jan Douwes Dekker yang tak lain saudara kandung Eduard Douwes Dekker, sastrawan Belanda yang ternama. Eduard menulis novel Max Havelaar (1860) dengan nama samaran Multatuli yang artinya “banyak yang aku sudah derita”. Karya Multatuli ini menjadi salah satu bacaan penting bagi kaum pergerakan nasional.

Pada masa itu, surat kabar yang terbit masih dikelola oleh Belanda dan berbahasa Belanda serta dikonsumsi orang-orang Belanda dan sebagian kecil pribumi kalangan ningrat. Untuk mengimbangi koran berbahasa Belanda, pada paruh kedua abad ke-19 muncul koran-koran berbahasa Melayu dan

Jawa. Misalnya, *Bintang Timoer* (Surabaya, 1850), *Bromartani* (Surakarta, 1855), *Bianglala* (Batavia, 1867), dan *Pemberita Betawie* (Batavia, 1874).

Koran pertama yang dianggap sebagai pelopor pers nasional adalah *Medan Prijaji* yang terbit di Bandung pada 1907, setahun sebelum lahirnya Boedi Oetomo. Pencetusnya ialah Tirto Adhi Soerjo (1880-1918), pengusaha pertama Indonesia yang bergerak di bidang penerbitan dan percetakan. Adhi Soerjo atau RM Djokomono dikenal pula sebagai wartawan Indonesia yang pertama kali menggunakan surat kabar sebagai alat untuk membentuk pendapat umum. Pada 1907, *Medan Prijaji* muncul sebagai koran mingguan dan baru pada tahun 1910 berkembang menjadi koran harian. Sayangnya, koran ini hanya mampu bertahan selama lima tahun. Pada masa jayanya, koran ini mencapai oplah 2.000 eksemplar, oplah yang cukup besar (Muhtadi, Asep Saeful, 1999: 22).

Penerbitan pers Indonesia makin berkembang di berbagai kota, terutama setelah tahun 1920. Perkembangan ini juga melahirkan pers Islam dan koran berbahasa Cina dan Arab. Pada dasarnya, pers telah menjadi alat perjuangan. Muhammad Hatta, selain menulis di *Daulat Ra'jat* yang terbit di Jakarta, juga tercatat sebagai pemimpin redaksi harian *Oetoesan Indonesia* yang terbit di Yogyakarta tahun 1932 (menggantikan *Oetoesan Hindia*). Sementara itu, Ir. Soekarno pada masa itu banyak menulis dan terlibat dalam penerbitan *Fikiran Ra'jat* di Bandung.

Dalam suasana penuh gelora semangat pergerakan nasional ke arah kemerdekaan, Adam Malik bersama Soemanang, A.M. Sipahoetar, dan Pandoe Kartawigoena mendirikan Kantor Berita Antara pada 13 Desember 1937. Pada zaman pendudukan Jepang, pemerintah melarang penerbitan koran-koran. Akan tetapi, pada akhirnya ada lima media yang mendapat izin terbit: *Asia Raja*, *Tjahaja*, *Sinar Baru*, *Sinar Matahari*, dan *Suara Asia*. Kantor Berita Antara dikendalikan pemerintah dan diubah namanya menjadi Domei.

Ketika Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dikumandangkan, para pemuda menggunakan fasilitas di Kantor Berita Domei untuk menyebarluaskan berita. Domei atau Antara menjadi tulang punggung menyiarkan kabar tersebut. Hal ini adalah wujud kecintaan dan baktinya yang besar bagi perjuangan bangsa Indonesia. Tahun 1962, Antara resmi menjadi lembaga kantor berita nasional yang berada langsung di bawah presiden Republik Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia membawa berkah bagi jurnalisme. Pemerintah Indonesia menggunakan Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai media komunikasi. Menjelang penyelenggaraan Asian Games IV, pemerintah memasukkan proyek televisi. Sejak tahun 1962 inilah, Televisi Republik Indonesia (TVRI) muncul dengan teknologi layar hitam putih dan baru bersiaran di Jakarta.

Setelah Indonesia merdeka, jurnalisme memasuki perguruan tinggi (sebagian besar masih menyebut publisistik). Selanjutnya, pada masa revolusi, pers Indonesia terjebak pada pers partisan. Pers dengan sadar memilih sebagai juru bicara sekaligus berperilaku seperti partai politik yang disukai dan didukungnya. Pada masa Soekarno, terjadi pemberedelan media, seperti *Pedoman*, *Indonesia Raya*, dan *Panji Masyarakat*.

Setelah peristiwa G30S, pers Indonesia lebih berorientasi pada bidang ekonomi ketimbang politik. Sistem ekonomi yang diterapkan pemerintah setelah tahun 1969 memberi ruang besar dan kuat bagi pasar internasional. Timbul persaingan produk, promosi, dan periklanan. Bisnis iklan berkembang dan mimbar promosi lewat iklan tumbuh pesat bagi surat kabar. Terjadi semacam kesulitan memilih atau memberi batas, apakah pers sebagai bisnis atau sebagai saluran idealisme. Beberapa pers mampu menyeimbangkannya hingga keuntungan finansial dapat diperoleh dan idealismenya tetap dipegang teguh.

Pada masa kekuasaan Presiden Soeharto, terjadi beberapa kali pemberedelan media massa. Meletusnya demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan pada 15 Januari 1974 (dikenal dengan Peristiwa Malari 1974) membuat Soeharto marah. Puncaknya, pada 24 Januari 1974, sejumlah media yang dianggap memicu Malari ditutup, seperti *Pedoman*, *Indonesia Raya*, *Harian Kami*, dan *Abadi*. Pemberedelan berikutnya terjadi pada 1982. Ketika itu *Majalah Tempo* diberedel akibat mengulas kampanye Golkar yang rusuh, tetapi tak lama kemudian diizinkan terbit kembali.

Pada 21 Juni 1994, *Tempo* kembali diberedel (istilah formalnya: izinnya dibatalkan bersama saudara tirinya majalah *Editor* dan tabloid politik yang sedang berkembang *DeTik* (catatan: *DeTik* tak ada hubungannya dengan *detik.com*). Ketiga media ini diberedel setelah mereka mengeluarkan laporan investigasi tentang berbagai masalah penyelewengan oleh pejabat-pejabat negara. Betapa kuat sensor kekuasaan pada waktu itu. Kontrol ini dipegang melalui Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hal inilah yang kemudian memunculkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

yang mendeklarasikan diri di Wisma Tempo Sirna Galih, Mega Mendung, Jawa Barat. Beberapa aktivisnya dimasukkan ke penjara.

Saat itu, pers harus memiliki izin terbit, yaitu surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) yang dikeluarkan oleh pemerintah (Departemen Penerangan) setelah mendapat rekomendasi dari PWI dan Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS). Tanpa rekomendasi keduanya, badan usaha yang mengajukan izin tidak akan mendapat izin. Baik PWI maupun SPS merupakan organisasi satu-satunya di bidang masing-masing. Dewan Pers dipimpin oleh menteri penerangan dan sekretarisnya ialah dirjen Pembinaan Pers dan Grafika (PPG), yaitu direktorat jenderal yang mengurus pers.

Titik kebebasan pers mulai terasa lagi ketika B.J. Habibie menggantikan Soeharto. Reformasi 1998 telah membawa perubahan besar di segala bidang, terutama perubahan politik. Pers juga mengalami euforia, kebebasan pers mengalami perubahan drastis. Banyak media muncul dan PWI tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi profesi. Untuk menerbitkan koran atau majalah, tidak perlu SIUPP atau izin apa pun. Kegiatan jurnalisme diatur dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Sebagai pengawas kehidupan pers, ada Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI.

B. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP JURNALISME

Menurut *Webster Dictionary*, *journalisme* adalah kegiatan mengumpulkan berita atau memproduksi sebuah surat kabar. Secara singkat, jurnalisme adalah kegiatan yang dilakukan oleh wartawan. Sementara itu, jurnalistik merupakan kata sifat (adjektiva) dari jurnalisme. Namun, di Indonesia, orang sering menggunakan kedua istilah itu (jurnalisme dan jurnalistik) untuk satu pengertian, yaitu hal yang menyangkut kewartawanan. Hal tersebut meliputi menyiapkan, menulis, mengolah/mengedit, dan menyiarkan suatu berita.

Grolier Multimedia Encyclopedia menyebutkan, “*Journalism, the collection and periodical dissemination of current news and events, or, more strictly, the business of managing, editing, or writing for journals or newspapers. The usage of the term has broadened to include news reporting and commentaries on radio and television, and, to a lesser extent, motion pictures.*” Jurnalisme adalah pengumpulan dan penyebaran informasi secara periodik atas peristiwa dan kejadian terkini atau lebih tegasnya adalah

seluruh kegiatan pengelolaan, penyuntingan, atau penulisan surat kabar. Penggunaan istilah ini meliputi reportase berita dan komentar-komentar di radio ataupun di televisi dan sedikit lebih luas lagi dalam film.

Definisi jurnalisme, menurut literatur, memang banyak. Para tokoh komunikasi atau tokoh jurnalisme mendefinisikannya berbeda-beda, tetapi hakikatnya sama, yakni jurnalisme adalah proses membuat berita untuk khalayak atau publik. Jurnalisme mempunyai fungsi sebagai pengelolaan laporan harian yang menarik minat khalayak, mulai dari peliputan sampai penyebarannya kepada masyarakat serta mengenai apa saja yang terjadi di dunia, yaitu apa pun yang terjadi, baik peristiwa faktual, fakta (*fact*), maupun pendapat seseorang (*opini*), untuk menjadi sebuah berita kepada khalayak.

Jurnalisme mencakup tiga hal yang tidak bisa dipisahkan: proses, teknik, dan ilmu. Sebagai bentuk proses, jurnalisme adalah kerja keras sekaligus cerdas dalam mencari, menggali, mengolah, memeriksa kembali (*verifikasi*), dan menuliskannya dalam sebuah berita untuk disebarluaskan. Sebagai hal teknis, jurnalisme menuntut keterampilan dan keahlian. Sebagai kajian ilmu, jurnalisme adalah bagian dari ilmu komunikasi yang terus berkembang seiring kemajuan zaman.

Dilihat dari segi bentuk dan pengolahannya, jurnalisme dibagi dalam tiga bagian besar: jurnalisme media cetak (*newspaper and magazine journalism*), jurnalisme media elektronik auditif (*radio broadcast journalism*), dan jurnalisme media audiovisual (*television journalism*). Jurnalisme media cetak meliputi jurnalisme surat kabar harian, jurnalisme tabloid harian, jurnalisme tabloid mingguan, dan jurnalisme majalah. Jurnalisme media auditif adalah jurnalisme radio siaran. Jurnalisme media elektronik audiovisual adalah jurnalisme televisi siaran dan jurnalisme media *online* (internet).

Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers menjelaskannya secara lebih perinci. Dalam Pasal 1 ayat 1, dijelaskan apa itu pers sekaligus apa itu kegiatan jurnalistik. Bunyi pasal tersebut selengkapnyanya sebagai berikut.

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, data, grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-undang ini sudah memasukkan media internet sebagai media massa dalam cakupan pengertian 'segala jenis saluran yang tersedia'. Pemberitaan yang dilakukan berbagai *media online*, seperti *republika.co.id*, *KCM (Kompas Cyber Media, kompas.com)*, dan *media dot.com (detik.com, astaga.com)*, adalah jasa media massa yang membawa pesan-pesan lewat pemberitaannya (Ecip, 2007: 6). Dalam hal ini, *media online* adalah versi *online* dari media cetak, televisi, atau radio. Sementara itu, *media dot.com* sejauh ini lahir tersendiri tanpa ada bentuk media lain yang mendahului. Pada perkembangannya, sekadar contoh, ternyata *detik.com* memunculkan *detiktv* yang *online* di internet. Diramalkan, ke depan memang akan terjadi era konvergensi media, yaitu media cetak-audio-visual akan menjadi satu dan bersifat *online*.

Mengutip Preston (2001), Anang Hermawan menulis, "Di ranah praktis, konvergensi media bukan saja memperkaya informasi yang disajikan, melainkan juga memberi pilihan kepada khalayak untuk memilih informasi yang sesuai dengan selera mereka. Tidak kalah serius, konvergensi media memberikan kesempatan baru yang radikal dalam penanganan, penyediaan, distribusi, dan pemrosesan seluruh bentuk informasi, baik yang bersifat visual, audio, data, dan sebagainya (*Bernas Jogja*, 5 April 2007)." Kehadiran *media online* itu memungkinkan khalayak tinggal *klik* dan segera mendapat informasi yang diinginkan, sedangkan sang wartawan dapat memperbarui informasinya sesuai perkembangan di lapangan.

Namun, harus disadari, setiap bentuk pers memiliki ciri dan kekhasannya masing-masing. Ciri dan kekhasannya itu antara lain terletak pada aspek filosofi penerbitan, dinamika teknis persiapan dan pengelolaan, serta asumsi dampak yang ditimbulkan terhadap khalayak. Surat kabar harian menekankan kecepatan dalam perolehan dan penyebaran informasi, sedangkan majalah menekankan segi kelengkapan dan kedalaman informasi serta ketajaman daya analisisnya. Kecepatan pemberitaan dewasa ini dilakukan oleh siaran radio dan *media online/dot.com* yang dapat menyiarkan peristiwa pada saat kejadian.

Demikian pula antara media cetak dan media elektronik masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kelebihan media cetak adalah berita yang disiarkannya dapat dibaca kapan saja dan secara berulang-ulang, mudah dibawa, serta dapat didokumentasikan. Isinya lebih mendalam dan kaya data. Namun, tidak semua orang bisa membaca dan memahami isi media cetak dengan cepat. Artinya, dibutuhkan tingkat kemampuan membaca

tertentu serta waktu yang cukup. Berbeda dengan radio atau televisi yang dapat langsung dinikmati karena beritanya relatif pendek dan umumnya masyarakat memiliki televisi dan radio. Sementara itu, media *online*, meskipun mudah tetapi, memerlukan perangkat komputer (bisa juga *handphone*) yang tersambung internet dengan baik.

Dari porsi pekerjaan jurnalisme untuk media cetak dan media elektronik, memiliki perbedaan yang signifikan. “Pada media massa cetak yang terbit secara periodik, kegiatan jurnalismenya hampir penuh, sedangkan di media elektronik hanya merupakan sebagian kegiatan media tersebut. Produk surat kabar harian hampir sepenuhnya menjual informasi (termasuk iklan), sedangkan pada media elektronik, produknya tidak hanya informasi/berita, tetapi juga ada sinetron, sandiwara, musik, iklan, dan lain-lain. Meskipun kegiatan jurnalisme pada media elektronik hanya sebagian kecil, tetapi sangat penting. Namun, berita adalah satu unggulan dalam penjualannya (Ecip, 2007: 7).

Telah disebutkan, kegiatan jurnalisme itu meliputi menyiapkan, menulis, mengolah/mengedit, dan menyiarkan berita. Orang yang menjalankan fungsi jurnalisme ini disebut jurnalis atau wartawan. Tingkatan wartawan terbentang mulai dari wartawan pemula sampai pemimpin redaksi. Dari sisi fungsi, wartawan yang bekerja di sebuah media dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang selalu terjun ke lapangan (disebut reporter) serta yang banyak di kantor dengan tugas menulis akhir dan menyunting (disebut redaktur atau editor). Ini bukan pembagian yang kaku. Sering kali redaktur, bahkan pemimpin redaksi, juga terjun melakukan tugas lapangan, yakni reportase dan wawancara.

1. Produk Jurnalisme

Secara praktis, dapat dikatakan bahwa kerja jurnalisme adalah usaha penyebaran informasi yang diolah dalam bentuk berita dan produk jurnalisme lainnya. Dalam konteks ini, ada tiga hal yang menjadi kata kunci: informasi, penyusunan, dan penyebarluasan.

Sumber informasi karya jurnalisme adalah peristiwa (*events*) atau pendapat (opini) yang mengandung nilai berita, masalah hangat (*current affair*), dan masalah unik yang ada dalam masyarakat. Sumber karya jurnalisme ini biasanya disebut peristiwa/fakta atau pendapat.

Pengolahan tentu saja meliputi serangkaian pekerjaan, mulai dari mencari/menemukan informasi, menemukan fakta yang bisa diulas,

melakukan wawancara dan mencari data-data pendukung, menulis atau membuat laporan, menyunting/*editing*, dan sebagainya, baru kemudian diterbitkan/ditayangkan.

Pengolahan sumber informasi melalui kerja jurnalisme ini akan menghasilkan karya jurnalisme. Produk jurnalisme terbagi dalam dua bagian, yaitu berita dan opini/sudut pandang atau *news* dan *views*. Jadi, dalam setiap media, akan selalu ada *news* dan *views* dan tentu saja ada iklan. Iklan tidak masuk dalam pembahasan di sini.

News atau berita adalah laporan peristiwa yang memiliki nilai berita (*news value*), antara lain *magnitude*, *proximity*, *conflict*, dan *human interest* (*news value* dibahas di modul lain). Berita bisa juga disebut informasi terbaru. Jenis-jenis tulisan *news* ini meliputi *straight news* dan *feature news*.

Adapun *views* adalah pandangan atau pendapat mengenai suatu masalah atau peristiwa. Di media, *views* ini muncul dalam bentuk *editorial*, *special article*, *column*, dan *feature article*. Adapun yang termasuk dalam kategori *views* adalah karikatur, pojok humor, dan surat pembaca.

Dalam *views* ini, media memerlukan tulisan dari luar, seperti surat pembaca, *press release*, artikel, baik berupa kolom, opini, maupun *feature*. Pertimbangan pemuatan sepenuhnya ada di tangan redaksi/penjaga rubrik atau diputuskan hingga tingkat pemimpin redaksi. Tulisan dari luar akan diedit sesuai *space* yang tersedia. Untuk *press release*, bisa saja menjadi bahan informasi untuk dikembangkan atau langsung dimuat dengan *editing* seperlunya.

Ragam tulisan dan teknik menulisnya secara mendalam akan dibahas di modul lain. Berikut beberapa pengertian dasar terkait produk jurnalisme yang perlu diketahui.

a. *Straight news*

Berita lempang, yaitu berita yang paling sering ditemui di surat kabar karena melaporkan kejadian di level permukaan secara cepat. Berita ini disebut juga *hard news* atau *spot news*.

b. *Feature news*

Berita kisah, yaitu berita yang seperti cerita atau kisah sehingga menarik. Berita ini banyak ditemukan di majalah/tabloid. Beberapa koran sebagian tulisan bergeser ke *feature*. Dengan *feature*, deskripsi menjadi hidup. Tidak jarang *features* diterjemahkan menjadi karangan khas.

c. *In depth news*

Berita yang lebih mendalam ini dinamakan juga *interpretative news*. Berita diolah dan disajikan dalam uraian yang menyeluruh (komprehensif), mengandung penafsiran (interpretatif), dan menggali serta membongkar masalah yang disajikan (investigatif).

2. Editorial atau Tajuk/Tajuk Rencana

Opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai suatu institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat.

Article/special article (opini, kolom, dan feature)

Tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial. Tulisan tersebut bertujuan untuk memberi tahu (informatif), memengaruhi dan meyakinkan (persuasif argumentatif), atau menghibur khalayak pembaca (rekreatif). Ada artikel praktis, artikel ringan, artikel berat (kolom dan opini), dan ada artikel dalam bentuk *feature* yang ringan, tetapi mengesankan.

3. Kolom vs Opini

Keduanya sama-sama merupakan artikel. Berisi gagasan atau ulasan suatu tema. Namun, sebenarnya bisa dibedakan bahwa opini lebih luas/dalam daripada kolom. Kolom boleh hanya memberikan sebuah pandangan atau penilaian, penekanan pada segi tertentu, dan melihat kecenderungan fakta. Opini tidak hanya mengulas, tetapi juga mengkritik sekaligus memberi solusi. Namun, pada praktiknya, kolom dan opini disamakan atau beda-beda tipis. Kolom biasanya ditulis oleh orang-orang tertentu dan kadang secara periodik.

4. Feature Article

Berbeda dengan *feature news* yang harus memenuhi syarat aktualitas serta objektivitas, *feature article* lebih banyak mengungkap sisi lain dari hal-hal yang akan diangkat. *Feature* ini bisa mengangkat banyak hal, biasanya *feature human interest*, perjalanan, petunjuk praktis, biografi, sejarah, bahkan *scientific feature* atau penemuan ilmiah.

5. Pojok

Kutipan pernyataan singkat narasumber atau peristiwa tertentu yang dianggap menarik atau kontroversi. Ada media memberi komentar humor dan tajam, tetapi ada juga yang tidak. Nama rubrik juga beragam. Rubrik pojok hanya ada di pers Indonesia.

6. Karikatur

Gambar wajah seseorang atau lebih dengan ekspresi karakter yang berlebihan. Tampilannya berkaitan dengan peristiwa yang sedang hangat. Di media, biasa ada sedikit teks yang menggelitik untuk memperkuat pesan.

7. Surat Pembaca

Opini singkat yang ditulis pembaca dan dimuat khusus pada rubrik *Surat Pembaca* (nama rubrik bisa beragam). Biasanya, rubrik ini berisi komentar atau keluhan pembaca tentang apa saja yang menyangkut kepentingan dirinya atau kepentingan umum.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkanlah jasa Karl Bucher (1847—1930) pada bidang ilmu persuratkabaran!
- 2) Sebutkan peran penting Max Weber (1864—1920) dalam dunia persuratkabaran!
- 3) Apa perbedaan penting porsi pekerjaan jurnalisisme media cetak dan elektronik?
- 4) Ada berapa jenis garis besar ruang lingkup produk jurnalisisme? Berikan penjelasan!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Jasa-jasa Karl Bucher sebagai berikut.
 - a. Untuk pertama kalinya, ia melakukan penyelidikan historis di bidang persuratkabaran.
 - b. Untuk pertama kalinya, ia mengajarkan pengetahuan persuratkabaran di kalangan masyarakat akademis.

- c. Ia adalah salah seorang pendiri sebuah lembaga persuratkabaran yang pertama di Eropa, yaitu *Leipzig*.
- 2) Peran penting Max Weber dalam dunia persuratkabaran sebagai berikut.
 - a. Weber adalah orang pertama yang melakukan penelitian sosiologis terhadap problem persuratkabaran.
 - b. Weber berhasil membuat generalisasi yang sangat penting dalam pengembangan teori dan praktik jurnalistik. Lewat karyanya *Soziologie des Zeitungswens*, Weber mengemukakan dua hal pokok yang menarik: (1) soal modal dan pengaruh para pemilik modal kepada redaksi; serta (2) sifat kelembagaan (*institution character*) dari surat kabar.
- 3) Perbedaan porsi pekerjaan jurnalisme media cetak dan media elektronik sebagai berikut. “Pada media massa cetak yang terbit secara periodik, kegiatan jurnalismenya hampir penuh, sedangkan di media elektronik hanya merupakan sebagian kegiatan media tersebut. Produk surat kabar harian hampir sepenuhnya menjual informasi (termasuk iklan), sedangkan pada media elektronik, produknya tidak hanya informasi/berita, tetapi juga ada sinetron, sandiwara, musik, iklan, dan lain-lain. Kegiatan jurnalismenya hanya sebagian kecil, tetapi sangat penting. Meski demikian, berita adalah satu unggulan dalam penjualannya (Ecip, 2007: 7).”
- 4) Garis besar ruang lingkup produk jurnalisme terbagi dalam dua bagian, yaitu berita dan opini/sudut pandang atau *news* dan *views*.

News atau berita adalah laporan peristiwa yang memiliki nilai berita (*news value*), antara lain *magnitude*, *proximity*, *conflict*, dan *human interest* (*news value* dibahas di modul lain). Berita bisa juga disebut informasi terbaru. Jenis-jenis tulisan *news* ini meliputi *straight news* dan *feature news*.

Adapun *views* adalah pandangan atau pendapat mengenai suatu masalah atau peristiwa. Di media, *views* ini muncul dalam bentuk *editorial*, *special article*, *column*, dan *feature article*. Adapun yang termasuk dalam *views* adalah karikatur, pojok humor, dan surat pembaca.



Surat kabar memang merupakan bentuk media massa yang tertua. Wajarlah apabila pendidikan jurnalisme pada awalnya disebut pendidikan persuratkabaran. Mengingat sejarahnya yang demikian, pembahasan jurnalisme selalu bertolak dari media cetak.

Bahkan, pelatihan jurnalisme untuk awak media elektronik harus pula dari pemahaman tentang media cetak. Tak sedikit dari mereka justru direkrut dari media cetak.

Secara akademis, jurnalisme dipelopori oleh Karl Bacher di Universitas Bazle, Swiss. Kemudian, ada pula Max Weber yang mengamati hubungan kekuatan modal dan redaksi serta menyimpulkan adanya pertentangan abadi antara keduanya. Ia pula yang menyinggung prinsip anonimitas dan *by-line* dalam penulisan berita. Cara *by-line* membuat penulis menjadi terkenal dan pemilik modal merasa terancam karena popularitas surat kabar tergantung popularitas wartawan atau penulis.

Amerika Serikat, dengan tokohnya Joseph Pulitzer, memelopori lahirnya School of Journalisme di Universitas Columbia, New York. Lembaga ini berdiri pada 1912 atau setahun setelah Pulitzer wafat. Amerika menekankan kewartawanan adalah sebuah pekerjaan yang perlu dukungan ilmu yang mapan, bukan sekadar pekerjaan teknik kelas tukang. Selain bakat, untuk menjadi wartawan yang baik perlu pendidikan yang baik.

Definisi jurnalisme sangat beragam, tetapi selalu bermuara pada proses pencarian berita, pengolahan, lalu penyebaran. Undang-undang Nomor 40/1999 tentang Pers menjelaskannya lebih perinci. Dalam Pasal 1 ayat 1, dijelaskan apa itu pers sekaligus apa itu kegiatan jurnalisme. Produk-produk jurnalisme (lagi-lagi untuk media cetak) dapat dipilah sebagai *news* (berita) dan *views* (pandangan atau pendapat).

Jenis tulisan *news* meliputi *straight news* dan *feature news*. Adapun jenis *views* muncul dalam bentuk *editorial*, *special article*, *column*, dan *feature article*. Yang termasuk dalam *views* ini adalah karikatur, pojok humor, dan surat pembaca. Dalam hal *views*, media memerlukan tulisan dari luar, seperti surat pembaca, *press release*, dan artikel, baik berupa kolom, opini, maupun *feature*.



TES FORMATIF 1 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Di Amerika Serikat, terdapat hadiah di bidang jurnalisme, yaitu
 - A. Nobel
 - B. Pulitzer
 - C. Oscar
 - D. Golden Globe

- 2) Kata jurnalistik berasal dari kata
 - A. *acta diurna*
 - B. *acta publica*
 - C. *acta jurnalica*
 - D. *acta verbum*

- 3) Berikut ini adalah sumber informasi karya jurnalisme, yaitu
 - A. peristiwa
 - B. pendapat
 - C. masalah hangat
 - D. semua benar

- 4) Sistem anonim dalam penulisan berita atau artikel berarti
 - A. artikel yang ditulis dua orang atau lebih wartawan
 - B. artikel yang mencantumkan nama wartawan yang menulisnya
 - C. artikel yang tidak mencantumkan nama wartawan yang menulisnya
 - D. semua salah

- 5) “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, data, grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.” Definisi pers di atas terdapat dalam
 - A. *Grolier Multimedia Encyclopedia*
 - B. *Webster Dictionary*

- C. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
 - D. Undang-Undang Nomor 40/1999
- 6) Di masa depan, diperkirakan bahwa media cetak-audio-visual akan menjadi satu dan bersifat *online*. Hal ini disebut
- A. konvergensi media
 - B. akuisisi media
 - C. pemberedelan media
 - D. spesial media
- 7) Berita lempang adalah berita yang paling sering ditemui di koran karena melaporkan kejadian di level permukaan secara cepat. Berita lempang disebut
- A. *feature*
 - B. kolom
 - C. *in depth news*
 - D. *straight news*
- 8) Berita kisah, yaitu berita yang seperti cerita sehingga menarik dan banyak ditemukan di majalah/tabloid. Berita kisah disebut
- A. *feature*
 - B. kolom
 - C. *in depth news*
 - D. *straight news*
- 9) Pada masa Orde Baru, pemberedelan media massa terjadi sebanyak
- A. sekali
 - B. dua kali
 - C. tiga kali
 - D. empat kali
- 10) Ilmuwan pertama yang mengamati hubungan kekuatan modal dan redaksi, kemudian menyimpulkan adanya pertentangan abadi antara keduanya adalah
- A. Karl Bucher
 - B. Max Weber

- C. Karl Marx
- D. Johan Carolus

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Hubungan Pers dan Jurnalisme

Apakah bedanya jurnalisme dengan pers? Di mata orang awam, dua istilah itu sering dianggap sama. Mereka biasa menyebut jurnalisme dengan pers dan sebaliknya. Padahal, sesungguhnya dua hal itu berbeda meskipun tidak bisa saling dipisahkan. Jurnalistik atau jurnalisme merujuk pada proses kegiatan mencari, menggali, mengumpulkan, mengolah, memuat, dan menyebarkan berita. Sementara itu, pers adalah lembaga yang melakukan kegiatan jurnalisme itu.

Umumnya, masyarakat lebih akrab dengan kata pers. Mungkin Anda juga demikian karena sering melihat wartawan ketika bertugas membawa kartu bertuliskan PERS secara mencolok yang dikalungkan di lehernya. Selain itu, tulisan PERS bisa juga tertera di topi, rompi, peralatan, bahkan kendaraannya, seperti sepeda motor atau mobil. Tak heran apabila ada masyarakat yang menyimpulkan bahwa pers itu adalah wartawan, seperti halnya kesimpulan jurnalisme adalah pers dan sebaliknya.

Apa boleh buat, sejauh ini pemahaman masyarakat seperti itu. Namun, itu tidak mengurangi kedekatan pers dengan masyarakat. Masyarakat dan pers memang tidak bisa dipisahkan karena pers lahir dan tumbuh di masyarakat. Sementara itu, masyarakat membutuhkan informasi yang berkualitas. Kini, peran media semakin penting di tengah-tengah masyarakat. Pers kemudian tumbuh dengan pesat.

Pada dasarnya, lembaga penyebaran informasi yang disebut sebagai “pers” lahir dari naluri alamiah manusia untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya. Pers atau media massa (kecuali buku) dibentuk manakala penyebaran informasi kepada masyarakat dilakukan secara lebih sistematis, terorganisasi, dan menggunakan teknologi komunikasi modern.

Apa pun yang terjadi sudah tentu menjadi tugas dan kewajiban pers untuk menyiarkannya kembali kepada khalayak. Karena itu, berbicara soal pers, mau tidak mau berbicara soal ilmu jurnalisme. Dengan kata lain, pers sangat erat kaitannya dengan jurnalisme.

Jika dilihat dari sejarah persuratkabaran, istilah “pers” lahir dari bahasa Belanda atau bahasa Inggris *press* yang artinya mencetak. Pengertian yang lebih operasional, pers berarti publikasi atau pemberitahuan secara tercetak. Istilah pers biasanya digandengkan dengan kata lain, seperti pers buruh

(*arbeiderpers*), pers informasi (*information press*), pers murah (*penny press*), pers opini (*opinion press*), dan sebagainya (Muhtadi, Asep Saeful, 1999: 25).

Dari pengertian tersebut, pada awalnya, surat kabar sangat dominan sebagai pemasok informasi bagi masyarakat. Pers seolah-olah identik dengan media cetak saja (pengertian sempit). Pada masa modern, masyarakat bisa mendapat informasi dari berbagai media (cetak, radio, televisi, internet, dan film). Karena itu, pers dalam pengertian luas mencakup semua media komunikasi massa lainnya: radio, televisi, dan film yang berfungsi memancarkan/menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain (Rachmadi, 1990: 9-10).

A. APA KATA UU PERS?

UU Nomor 40/1999 tentang Pers Pasal 1 ayat 1 mengungkapkan, “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal 3

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
2. Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Pasal 5

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani hak jawab.
3. Pers wajib melayani hak koreksi.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 tersebut, pers memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Fungsi Pers sebagai Media Informasi

Fungsi utama pers adalah menyampaikan informasi secepat-cepatnya kepada masyarakat seluas-luasnya. Setiap informasi yang disampaikan harus memenuhi kriteria, yaitu aktual, akurat, faktual, menarik atau penting, benar, lengkap, utuh, jelas-jernih, jujur, adil, berimbang, relevan, bermanfaat, serta etis.

2. Fungsi Mendidik/Edukasi

Khalayak lebih mudah dipengaruhi media. Betapa banyak anak yang lebih terpengaruh mengikuti pesan-pesan media (terutama lewat televisi) ketimbang nasihat orang tua. “Media massa telah mengambil alih peran-peran orang tua, guru, kiai, pendeta, dan bahkan penguasa politik sekalipun. Media ternyata memiliki kekuatan raksasa dalam memengaruhi sekaligus mengubah pola pikir, sikap dan perilaku, serta publik. Media telah berhasil memainkan salah satu fungsinya sebagai saluran yang efektif dalam

melakukan pendidikan sosial, politik, moral, dan berbagai arti kehidupan lainnya secara masal (Muhtadi, Asep Saeful, 1999: 29).”

Jadi, selain berfungsi menyiarkan informasi, pers atau media massa juga berfungsi mendidik. Bahkan, apa pun informasi yang disebarluaskan pers hendaklah dalam kerangka mendidik. Memang, pers sebagai lembaga ekonomi juga dituntut mengejar keuntungan finansial, tetapi orientasi komersial itu sama sekali tidak boleh mengurangi, apalagi meniadakan fungsi dan tanggung jawab sosialnya.

3. Fungsi Menghibur/Rekreasi

Secara umum, media massa memang memiliki fungsi menghibur. Lebih-lebih bagi masyarakat yang tingkat apresiasinya terhadap informasi masih sangat rendah, media massa hanyalah media hiburan.

Betapa pun pers harus mampu memainkan dirinya sebagai wahana rekreasi yang menyenangkan sekaligus yang menyehatkan bagi semua lapisan masyarakat. Artinya, apa pun pesan rekreatif yang disajikan, mulai dari cerita pendek sampai teka-teki silang dan anekdot, tidak boleh bersifat negatif, apalagi destruktif.

4. Fungsi Kontrol Sosial/Koreksi

Pers harus mampu menjalankan peran pengawasan dan fungsi kontrol jalannya roda pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) demi terwujudnya kesejahteraan rakyat dan keadilan. Dalam konteks sebagai fungsi kontrol sosial ini, setiap hari pers selalu mengawasi pemerintah. Tepatnya, pers mengawasi aparatur pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang telah digariskan. Wartawan harus mampu membongkar pelanggaran-pelanggaran hukum oleh aparat negara dengan tetap memperhatikan etika serta kepatutan kode etik pers. Dalam posisi ini, pers bertindak sebagai *watchdog* (anjing penjaga) terhadap pemerintah.

Pada lingkup yang lebih luas, pers harus mampu menjalankan fungsi kontrol terhadap apa yang terjadi masyarakat. Baik sebagai informasi preventif (mencegah) kepada masyarakat agar tidak menyalahi norma-norma di masyarakat maupun informasi yang sifatnya menghukum atas pelanggaran seseorang pada norma sosial. Pers mempunyai kapasitas memberikan sanksi terhadap masyarakat yang menyimpang dari norma yang berlaku.

Berdasarkan fungsi dan peranan pers yang demikian, lembaga pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourth estate*) setelah

lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta pembentuk opini publik yang paling potensial dan efektif. Namun, fungsi peranan pers itu baru dapat dijalankan secara optimal apabila terdapat jaminan kebebasan pers dari pemerintah. Sulit dibayangkan bagaimana peranan pers tersebut dapat dijalankan apabila tidak ada jaminan kebebasan pers.

Fungsi kontrol sosial tersebut sering dianggap yang paling utama karena mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, dari sudut pandang lain, bisa juga dikatakan bahwa fungsi media yang paling menonjol adalah fungsi mendidik, tentu mendidik dalam arti luas. “Dalam mendidik, sebenarnya sudah tercakup fungsi memberi informasi, menghibur, mengontrol, mewariskan kebudayaan, merekatkan masyarakat, dan lain-lain. Menjalankan fungsi mendidik dalam arti luas itu antara lain bermakna menjelaskan apa yang terjadi dengan berita daripada merasa penting karena menerima informasi yang paling awal (Ecip, 2007:8).”

a. Pers, pemerintah, dan masyarakat

Kebutuhan informasi merupakan kebutuhan mendasar, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Manusia merasa butuh untuk dapat mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya, informasi yang mencerdaskan kehidupannya, informasi yang memperluas cakupannya, bahkan membantu menjaga/meningkatkan status sosialnya.

Pemerintah tentu menyadari kemampuan pers untuk menyampaikan informasi kepada sejumlah besar khalayak dalam waktu singkat. Hal itu tidak diragukan lagi. Pemerintah dapat menggandeng pers untuk menyampaikan kebijakan dan program pembangunan, sedangkan masyarakat menyalurkan aspirasinya sebagai kontrol sosial.

Secara umum, dapat dikatakan di Indonesia ada yang namanya kebebasan pers, tetapi dibatasi dengan pengawasan pemerintah. Hubungan pers dan pemerintah mengarah pada “pers yang bertanggung jawab”, yang pengertiannya bisa subjektif menurut pemerintah. Apabila salah langkah, bisa fatal akibatnya bagi pers. Itulah sebabnya terjadi pemberedelan di era Soekarno ataupun era Soeharto.

Kekuatan pers disadari betul oleh pemerintah. Orde Baru sejak kelahirannya telah menggunakan peran penting pers. Sejak subuh 1 Oktober 1965, ketika terjadi kudeta, penguasa segera melakukan penguasaan media massa. “RRI yang diduduki pihak kudeta hari itu direbut kembali oleh tentara. TVRI yang bersiaran hitam putih untuk Jakarta dan sekitarnya sudah

dalam pengamanan tentara. Semua surat kabar tidak boleh terbit sejak 2 Oktober 1965, kecuali dua surat kabar harian yang diselenggarakan tentara, yakni surat kabar *Berita Yudha* yang dibuat oleh TNI Angkatan Darat dan surat kabar *Angkatan Bersenjata* yang diterbitkan Angkatan Bersenjata. Surat kabar yang ingin terbit kembali harus mengurus izin baru, terutama izin yang dikeluarkan oleh tentara, yaitu surat izin cetak (SIC). Surat kabar yang beraliran kiri tidak berani mengurus kembali izinnya, apalagi SIC, hingga seluruh media massa dalam kontrol penguasa baru (Ecip, 2007: 13—14).”

Surat kabar yang mudah terbit di masa Soekarno, terutama karena hanya bermodal semangat dan kepentingan politik tertentu, tidak bisa tumbuh di era pemerintahan Soeharto. Orde Baru bahkan mencabut subsidi kertas yang pada masa Soekarno tiap penerbit bisa menikmati selisih sekitar 30 persen dari harga pasar. Selama sekitar 30 tahun kekuasaan Orde Baru, kontrol terhadap pers benar-benar dilakukan, terutama melalui surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP). Apabila berita sebuah media tidak berkenan di mata pemerintah, siap-siaplah SIUPP-nya dibatalkan. Artinya, kemungkinan besar media itu harus tutup selamanya. Ketentuan SIUPP lahir melalui Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) Nomor 1/1984, turunan dari UU Nomor 21/1982 tentang Pers.

Jatuhnya kekuasaan Soeharto memang menjadi berkah bagi pers. Pada era Habibie, pers Indonesia menjadi bebas, tidak ada teguran, dan tidak perlu izin penerbitan (Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers). Apabila berniat menerbitkan pers, cukup mendaftarkan diri sebagai badan hukum, mencantumkan siapa penanggungjawabnya, dan di mana alamatnya. Terjadilah di era Reformasi hingga kini pers yang sangat bebas, bahkan oleh sementara orang dianggap sudah dalam taraf kebablasan.

b. Sembilan elemen jurnalisme

Betapa pun pers memiliki kebebasan, sebuah karya jurnalisme harus tunduk pada kaidah-kaidah yang selama ini ada. Setiap karya jurnalisme haruslah faktual, aktual, lengkap, jelas, objektif, berimbang, dan tentu saja etis. Kaidah itulah yang mestinya menjadi pemandu insan pers dalam bekerja. Di situlah hati nurani jurnalisme bermuara.

Secara gamblang, gambaran tentang hati nurani jurnalisme ditegaskan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel pada 2001 dalam karyanya yang fenomenal *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect* yang kemudian pada 2004 diterjemahkan menjadi

Sembilan Elemen Jurnalisme: Apa yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan Diharapkan Publik.

Buku *The Elements of Journalism* diluncurkan di lima kota di Indonesia (Jakarta, Medan, Surabaya, Bali, dan Yogyakarta) seraya menghadirkan Bill Kovach selama 17 hari pada November 2003. Dalam peluncuran di Surabaya, Kovach yang juga ketua Committee of Concerned Journalist, sebuah lembaga kewartawanan yang peduli kepada publik di Amerika, mengungkapkan, “Sembilan elemen itu saya dapatkan setelah melakukan wawancara dengan tiga ribu wartawan di Amerika.”

Pernyataan Kovach tersebut membuktikan bahwa bukunya dikerjakan dengan banyak penelitian dan wawancara. Analisisnya komprehensif, dalam, panjang, dan tentu terasa penting bagi jurnalis yang haus akan pengetahuan.

Sembilan elemen jurnalisme yang dipopulerkan Kovach meliputi (Kovach dan Rosenstiel, 2001: 12—13):

1. *journalism's first obligation is to the truth* (kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran),
2. *its first loyalty is to citizens* (loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat),
3. *it's essence is a discipline of verification* (inti sari jurnalisme adalah disiplin verifikasi),
4. *it's practitioners must maintain an independence from those they cover* (praktisi jurnalisme harus menjaga independensi terhadap sumber berita),
5. *it must serve as an independent monitor of power* (jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan),
6. *it must provide a forum for public criticism and compromise* (jurnalisme harus menyediakan forum kritik ataupun dukungan masyarakat),
7. *it must strive to make the significant interesting and relevant* (jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting menarik dan relevan),
8. *it must keep the news comprehensive and proportional* (jurnalisme harus menyiarkan berita komprehensif dan proporsional),
9. *it's practitioners must be allowed to exercise their personal conscience* (praktisi jurnalisme harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka).

Sembilan elemen tersebut merupakan navigasi agar kerja jurnalisme tidak salah arah sehingga selalu dekat dengan masyarakat. Dasar-dasar

tersebut tidak boleh dicaplok oleh konglomerasi, termanipulasi oleh tujuan politik, atau yang lainnya. Jurnalisme memiliki peran strategis dalam membangun dan mencerdaskan masyarakat. Lebih dari itu, ia hadir untuk memenuhi hak-hak warga negara.

Kovach dan Rosenstiel tidak hanya menyajikan konsep atau teori belaka. Mereka mengupas secara mendalam sembilan topik yang disebut sebagai prinsip utama jurnalisme. Mereka juga menyertakan contoh-contoh kasus untuk setiap elemen, baik contoh yang baik maupun contoh yang buruk, dari apa yang pernah diberitakan media atau pers Amerika Serikat.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Mengapa masyarakat umum lebih akrab dengan kata pers?
- 2) Berikan contoh bahwa pemerintah Orde Baru memanfaatkan peran penting pers untuk melestarikan kekuasaannya?
- 3) Jelaskan apa yang dimaksud dengan pers memiliki fungsi mendidik?
- 4) Sejak era Reformasi 1999, apa saja syarat untuk mendirikan pers?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Umumnya, masyarakat lebih akrab dengan kata pers karena sering melihat wartawan ketika bertugas membawa kartu bertuliskan PERS secara mencolok yang dikalungkan di lehernya. Selain itu, tulisan PERS bisa juga tertera di topi, rompi, peralatannya, bahkan kendaraannya, seperti sepeda motor atau mobil.
- 2) Pemerintah Orde Baru sejak kelahirannya telah menggunakan peran penting pers. Sejak subuh 1 Oktober 1965, ketika terjadi kudeta, penguasa segera melakukan penguasaan media massa. “RRI yang diduduki pihak kudeta, hari itu direbut kembali oleh tentara. TVRI yang bersiaran hitam putih untuk Jakarta dan sekitarnya sudah dalam pengamanan tentara. Semua surat kabar tidak boleh terbit sejak 2 Oktober 1965, kecuali dua surat kabar harian yang diselenggarakan tentara, yakni surat kabar *Berita Yudha* yang dibuat oleh TNI Angkatan Darat, dan surat kabar *Angkatan Bersenjata* yang diterbitkan Angkatan

Bersenjata. Surat kabar yang ingin terbit kembali harus mengurus izin baru, terutama izin yang dikeluarkan oleh tentara, yaitu surat izin cetak (SIC). Kemudian, kontrol terhadap pers dilakukan terutama melalui surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP). Apabila berita sebuah media tidak berkenan di mata pemerintah, siap-siaplah SIUPP-nya dibatalkan. Artinya, kemungkinan besar media itu harus tutup selamanya.

- 3) Khalayak lebih mudah dipengaruhi media. Banyak anak yang lebih terpengaruh mengikuti pesan-pesan media (terutama lewat televisi) ketimbang nasihat orang tua. “Media massa telah mengambil alih peran-peran orang tua, guru, kiai, pendeta, dan bahkan penguasa politik sekalipun. Media ternyata memiliki kekuatan raksasa dalam memengaruhi sekaligus mengubah pola pikir, sikap dan perilaku, serta publik. Media telah berhasil memainkan salah satu fungsinya sebagai saluran yang efektif dalam melakukan pendidikan sosial, politik, moral, dan berbagai arti kehidupan lainnya secara masal (Muhtadi, Asep Saeful, 1999: 29).”
- 4) Sejak era Reformasi, syarat untuk mendirikan pers adalah mendaftarkan diri sebagai badan hukum, mencantumkan siapa penanggungjawabnya, dan di mana alamatnya.



RANGKUMAN

Pers dan jurnalisme mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan merupakan suatu kesatuan. Pers sebagai lembaga media komunikasi massa tidak akan berguna apabila sajiannya jauh dari prinsip-prinsip jurnalisme. Sebaliknya, karya jurnalisme tidak akan bermanfaat tanpa disampaikan oleh pers sebagai medianya. Pers adalah lembaga media untuk menyampaikan karya jurnalisme dalam bentuk apa pun kepada masyarakat luas.

Pers, dalam arti sempit, terbatas hanya pada kegiatan publikasi yang menggunakan media cetak, termasuk buku. Sementara itu, pers dalam arti luas memasukkan semua media massa komunikasi yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang, baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan. Jadi, seiring perkembangan teknologi komunikasi, pers dalam arti luas mencakup seluruh kegiatan publikasi media apa pun bentuknya.

Fungsi pers tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Selain itu, masih ada fungsi yang mesti diemban pers,

yaitu fungsi mendidik (tanggung jawab media dalam upaya mencerdaskan masyarakat), fungsi menghibur (memberi daya tarik media agar diminati masyarakat), dan fungsi koreksi atau kontrol sosial (terutama menyangkut kebijakan pemerintah dan penyimpangan di masyarakat).

Melihat UU Nomor 40/1999, Pasal 3, 4, 5, dan 6, dapat disimpulkan betapa pentingnya fungsi pers bagi negara dan betapa beratnya tanggung jawab seorang insan pers. Untuk menjadi sosok insan pers yang sesuai dengan fungsi pers, dapat ditempuh salah satunya dengan berpatokan pada *semilan elemen jurnalisme* yang dirumuskan Bill Kovach dan Tom Rosenstiel.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pers disebut sebagai salah satu pilar demokrasi bersama-sama dengan pilar lainnya, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Istilah pers sebagai pilar demokrasi disebut
 - A. *first estate*
 - B. *second estate*
 - C. *third estate*
 - D. *fourth estate*

- 2) Empat fungsi pers adalah
 - A. informasi, mendidik, menghibur, dan menjaga moral
 - B. informasi, menghibur, meningkatkan kepatuhan masyarakat, dan menjaga moral
 - C. informasi, mendidik, menjaga moral, dan publikasi
 - D. informasi, mendidik, menghibur, dan koreksi

- 3) Pers adalah kegiatan publikasi yang menggunakan media cetak termasuk buku merupakan pengertian dalam arti
 - A. terbatas
 - B. sempit
 - C. luas
 - D. menyeluruh

- 4) Dalam sebuah organisasi media massa, orang yang bertanggung jawab pada isi pemberitaan kepada atasannya atau kepada hukum negara dan kode etik jurnalistik disebut
 - A. redaktur pelaksana
 - B. pemimpin umum
 - C. pemimpin redaksi
 - D. editor

- 5) Apabila seorang wartawan ternyata sering salah menyampaikan data, artinya wartawan tersebut belum menghayati *sembilan elemen jurnalisme*. Elemen yang belum dihayatinya adalah
 - A. *truth*
 - B. *loyalty to citizens*
 - C. *independence*
 - D. *verification*

- 6) Gambaran tentang hati nurani jurnalisme dituangkan dalam buku *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and The Public Should Expect*. Buku ini ditulis oleh
 - A. Karl Bucher dan Max Weber
 - B. Karl Bucer dan Johan Carolus
 - C. Max Weber dan Bill Kovach
 - D. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel

- 7) Perbedaan jurnalisme dengan pers adalah
 - A. tidak ada bedanya
 - B. hampir sama
 - C. pers adalah lembaga yang melakukan kegiatan mencari, menggali, mengumpulkan, mengolah, memuat, dan menyebarkan berita, sedangkan jurnalisme adalah lembaga yang melakukan kegiatan jurnalisme
 - D. jurnalisme adalah kegiatan mencari, menggali, mengumpulkan, mengolah, memuat, dan menyebarkan berita, sedangkan pers adalah lembaga yang melakukan kegiatan jurnalisme.

- 8) Apakah pemerintah Republik Indonesia sekarang boleh melakukan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran terhadap pers?
- A. boleh
 - B. tidak boleh
 - C. tergantung pada pelanggaran yang dilakukan pers
 - D. penyensoran hanya boleh dilakukan oleh Dewan Pers
- 9) Pandangan atau pendapat mengenai suatu masalah atau peristiwa yang diberitakan disebut
- A. *views*
 - B. *news*
 - C. *editorial*
 - D. *special article*
- 10) Istilah publisistik hampir tidak dikenal di wilayah
- A. Belanda
 - B. Jerman
 - C. Amerika Serikat
 - D. Hindia Belanda

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan kegiatan selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3

Profesi Wartawan dan Etika Jurnalisme

A. PERKEMBANGAN PROFESI WARTAWAN

Wartawan atau jurnalis adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalisme, yaitu orang yang membuat laporan sebagai profesi untuk disebarluaskan atau dipublikasi dalam media massa. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Sekarang, mestinya definisi ini ditambah dengan memasukkan media *internet/online*.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalisme (Pasal 1 ayat 4). Sementara itu, menurut Christianto Wibisono dalam buku *Pengetahuan Dasar Jurnalistik*, wartawan adalah abdi, hamba, dan pesuruh yang sukarela dari masyarakatnya. Wartawan adalah pembawa berita, penyuluh, pemberi penerangan, pengajak berpikir, dan pembawa cita-cita. Ia berkecimpung dalam segala segi hidup masyarakat yang berbeda-beda. Di atas segalanya, wartawan harus pemberani, jujur, dan memiliki kesetiaan pada darmanya itu (Wibisono, 1991: 3).

Lebih spesifik lagi, ada juga yang disebut wartawan foto untuk mereka yang khusus mencari berita dalam bentuk medium foto. Wartawan cetak adalah pencari berita untuk media cetak. Kemudian, ada wartawan televisi dan wartawan radio. Bahkan, kini dengan kemajuan teknologi, ada wartawan media *internet/online*. Ada juga wartawan lepas yang tidak menjadi staf tetap salah satu surat kabar, tetapi hanya menyumbangkan tulisan mewakili beberapa penerbit pers dan sering disebut *freelancer*.

Lahirnya UU Nomor 40/1999 tentang Pers, yang membolehkan media massa cetak terbit kapan saja dan di mana saja sepanjang memenuhi aturan yang berlaku, membuat media tumbuh seperti jamur di musim hujan. Sampai-sampai sulit dihitung jumlahnya. Dewan Pers pernah menyatakan jumlah media cetak di Indonesia mencapai 862 atau 900-an, tetapi angka ini

sulit dipastikan. Gampangnya menebitkan pers, ternyata juga berbanding lurus dengan kenyataan semudah itu pula menutupnya.

Realitas penerbitan pers memang memprihatinkan. Media massa cetak bisa terbit hari ini, lalu seminggu kemudian tutup karena bangkrut. Minggu berikutnya terbit dengan ganti nama, besoknya tidak jelas. Penyebab kebangkrutan itu beragam. Mereka bangkrut karena terbit tanpa manajemen yang bagus, sumber daya manusia (SDM) yang asal-asalan, bahkan ada yang terbit sekadar proyek untuk misi politik atau bisnis.

Media internet/*online* juga menunjukkan gejala timbul-tenggelam meskipun tidak separah media cetak. Namun, media elektronik, baik televisi maupun radio tetap eksis, sesulit apa pun keuangannya. Televisi dan radio, meskipun ada kesulitan keuangan, biasanya segera ada pemodal baru yang siap mengambil alih. Jurnalis televisi kini makin banyak seiring hadirnya televisi lokal. Pertumbuhan media cetak ataupun elektronik di era Reformasi memang luar biasa. Terbukti, selain media cetak yang mencapai angka 900-an, stasiun radio justru sudah mencapai angka 2.000-an, lalu menyusul stasiun televisi sebanyak 150-an dan 11 di antaranya merupakan stasiun yang bersiaran dari Jakarta secara nasional. Para pemodal mendirikan media dengan latar belakang kepentingan yang berbeda-beda (*waspada.co.id*, 18 Juli 2008).

Persoalannya, ketika media massa muncul hanya sebagai proyek coba-coba bisnis, khususnya seperti dialami kebanyakan media cetak, hal tersebut akan menghasilkan wartawan yang mutunya juga sekadarnya. Celakanya lagi, pembonceng identitas wartawan tersebut sama sekali tidak memiliki kompetensi jurnalistik. Dalam konteks itu, jelas akan tidak imbang ketika mereka kemudian disejajarkan dengan wartawan idealis atau profesional.

Tak heran apabila ada yang mengeluhkan bahwa wartawan sekarang tidak seperti wartawan tempo dulu. Wartawan tempo dulu melaksanakan tugas selalu mengedepankan idealis ketimbang bisnis. Kondisi wartawan sekarang tentu jauh berbeda. Faktor bisnis lebih banyak mendominasi.

Kini, euforia masih terasa. Setiap orang bisa menjadi apa saja, termasuk menjadi wartawan. Inilah pangkal persoalan bagi runyamnya pers di Indonesia. Banyak orang yang tiba-tiba menjadi wartawan dan memiliki kartu pers, padahal mereka tidak pernah melalui jenjang pendidikan jurnalisme yang memadai dan benar.

Karena tidak memiliki pendidikan yang memadai dan tidak pernah mendapatkan atau mengikuti pendidikan jurnalisme yang memadai dan

benar, tidaklah mengherankan kalau banyak oknum wartawan yang menyalahgunakan profesinya dan melanggar kode etik wartawan atau kode etik jurnalistik. Padahal, dengan jelas, UU Pers menegaskan, “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan, tetapi mereka harus memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Sebagai orang yang profesional dan dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum (Pasal 1, 7 dan 8).”

Wartawan merupakan sebuah profesi dari pekerjaan yang membutuhkan intelektualitas karena jurnalisme memang lahir dari dunia intelektual. Wartawan bukan preman. Wartawan adalah orang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi; rasa keterlibatan besar terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan; memiliki integritas, cermat, andal, siaga, dan disiplin; serta memiliki keterbukaan.

Profesi wartawan merupakan pekerjaan yang membutuhkan pemikiran, perenungan, dan kemampuan analisis untuk menginterpretasikan sebuah peristiwa yang terjadi di masyarakat. Perangkat itu harus bekerja saat wartawan menuliskan beritanya agar tidak terjadi salah tafsir ataupun salah pemberitaan. Wartawan adalah penyambung atau jembatan antara peristiwa dan khalayak atau *audience*.

Sekarang, sudah menjadi rahasia umum bahwa profesi wartawan sedikit tercoreng oleh oknum yang mengaku wartawan, tetapi tidak pernah terlibat di salah satu media massa. Sebutan mereka macam-macam: wartawan abal-abal, wartawan bodrek, wartawan tanpa surat kabar (WTS), wartawan gadungan, atau wartawan amplop. Mereka sama sekali tidak bekerja, terlibat, atau menjadi bagian dari struktur redaksional sebuah media massa. Dengan hanya berbekal selembaar kartu pers/*press card/press ID*, mereka berkeliaran dari satu kantor ke kantor lain untuk mencari korban. Tujuan mereka satu, memeras.

Di sisi lain, persaingan ketat media massa membuat banyak pers kurang profesional. Ketua Dewan Pers yang mengeluhkan makin banyaknya kritik dan tuntutan masyarakat terhadap pers melalui lembaganya adalah bukti kurang profesionalnya pers di Indonesia pada saat ini. Malah fakta yang dikemukakan Dewan Pers, hanya 30% penerbitan media massa cetak di tanah air yang sehat (*waspada.co.id*, 18 Juli 2008). Sementara itu, televisi lokal diduga hanya 10% yang sehat.

B. FUNGSI DAN PERAN WARTAWAN

Setiap hari masyarakat dapat menikmati berita-berita menarik dari berbagai tempat, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ada berita tentang kecelakaan, bencana alam, pemilihan presiden, demonstrasi, pecahnya perang, penemuan obat, tertangkapnya koruptor kakap, melemahnya mata uang, peresmian bendungan, sampai berita tentang perselingkungan tokoh publik.

Di antara orang-orang penting dalam peristiwa-peristiwa itu adalah wartawan. Dialah orang yang memberi kemungkinan kepada dunia untuk mengetahui kejadian-kejadian itu. Para wartawan dapat melaksanakannya dengan cepat, jujur, dan menarik karena dia telah memahami ilmu kewartawanan.

Peran wartawan, meskipun tanpa pernah diucapkan, sebenarnya adalah ingin juga mengubah dunia menjadi lebih baik. Seperti para dokter yang ingin membantu umat manusia, wartawan juga melakukan hal yang sama. Sejumlah wartawan melakukan pekerjaan mereka tanpa rasa takut, jauh melampaui tuntutan kewajiban mereka. Apabila dokter menolong orang melalui pengobatan, wartawan menolong orang lain melalui peristiwa yang diungkapkan dalam berita. Para wartawan dan sejumlah orang di kantor media menggunakan segenap kemampuannya untuk menolong banyak orang menghadapi persoalannya.

Itu berarti wartawan adalah pekerja profesional, seperti halnya dokter atau pengacara. Ia memiliki keahlian tersendiri yang tidak dimiliki profesi lain. Artinya, tidak semua orang bisa dengan serta-merta menjadi wartawan yang baik. Selain itu, wartawan juga punya tanggung jawab dan kode etik. Wartawan adalah profesi yang watak, semangat, dan cara kerjanya berbeda dengan seorang tukang.

Dalam Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers, istilah profesi ini muncul pada Pasal 1 ayat 10. “Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya” Kemudian, di Pasal 8, “Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.”

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Jadi, profesi itu membutuhkan keahlian dan kemampuan khusus yang tidak semua orang memilikinya. Secara umum, yang dimaksud dengan profesi adalah pekerjaan tetap yang memiliki unsur-unsur: himpunan pengetahuan dasar yang bersifat

khusus, keterampilan untuk menerapkannya, tata cara pengajuan yang objektif, dan kode etik serta lembaga pengawasan dan pelaksanaan penataannya.

Peran dan fungsi wartawan, sebagaimana fungsi pers, adalah memperjuangkan kepentingan rakyat dan melaksanakan kontrol sosial yang konstruktif. Tokoh pers, Rosihan, menulis, “Apabila dapat diterima asumsi bahwa wartawan itu adalah the *watchdog of public interest*, artinya pihak yang menjaga kepentingan umum sesungguhnya melakukan *public service journalism*, menjalankan pekerjaan kewartawanan yang melayani kepentingan masyarakat, dan memberikan jasa-jasanya kepada umum. Yang paling lazim dan disukai oleh wartawan adalah bertindak sebagai pengawas terhadap proses-proses pemerintahan. Akan tetapi, di samping itu, dewasa ini *public service journalism* bergerak ke jurusan daerah-daerah baru, seperti perjuangan untuk menegakkan hak-hak sipil, peperangan melawan kemiskinan, perjuangan melawan kejahatan, dan sebagainya (Mariani *et al*, 2006: 1.12-1.13).”

Sebutan yang membanggakan lagi, wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Karena itu, dalam menjalankan tugas profesinya, wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Perlindungan hukum jelas diberikan untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalisme dalam melaksanakan tugas jurnalismenya, yakni memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.

Tugas jurnalisme meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa. Dalam tugasnya, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, penyitaan, atau perampasan alat kerja, apalagi dihambat atau diintimidasi oleh pihak mana pun.

Ketika meliput wilayah konflik, wartawan wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan kesehatan yang memenuhi syarat, asuransi, pengetahuan, dan keterampilan dari perusahaan pers terkait kepentingan penugasan. Wartawan mesti menggunakan identitas sebagai wartawan hingga berada pada pihak yang netral.

Begitu pun dengan kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalisme, wartawan dapat menggunakan hak tolak (hak ingkar) untuk melindungi sumber informasi. Siapa pun tidak dibenarkan memaksa wartawan untuk menyebutkan sumber informasinya karena dia dilindungi kode etik dan undang-undang. Begitu juga dengan manajemen perusahaan

pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar kode etik jurnalistik atau hukum yang berlaku. Meskipun harus dicatat, hal-hal terkait perlindungan wartawan ini belum sepenuhnya dijalankan.

C. PERSYARATAN MENJADI WARTAWAN

Berikut ini adalah pengalaman dan risiko kerja yang dihadapi wartawan. Fotografer C. Sukma dari majalah *Ummat* dianiaya tentara dan dirusak kameranya saat meliput kerusuhan pada 27 Juli 1996 di depan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Jalan Diponegoro, Jakarta. Pihak berwenang, diwakili Kasdam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono, datang ke kantor media itu untuk minta maaf dan mengganti kamera yang rusak.

Pada 29 Desember 2003, reporter RCTI Sorri Ersasiregar tewas tertembak ketika terjadi kontak senjata antara tentara dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ersas dan juru kamera Fery Suntoro diculik oleh GAM pada 29 Juni dan berbulan-bulan tak ada beritanya. Ersas tewas, tetapi Ferry Suntoro dibebaskan GAM pada 16 Mei 2004.

Reporter Metro TV Meutia Hafid bersama *cameraman* Budiyanto menjadi sandera kelompok Mujahidin (*Jaish al-Mujahideen*) ketika ditugaskan meliput medan perang di Irak. Selama 168 jam dalam rentang waktu 15-22 Februari 2005, mereka harus hidup di tengah gurun. Drama penyanderaan ini berakhir setelah Presiden SBY berpidato secara resmi meminta pembebasan Meutia dan Budi yang disiarkan televisi internasional.

Kisah lainnya, kantor majalah *Tempo* dirusak massa setelah berita pada edisi 3 Maret 2003 menyebut Tommy Winata berada di balik kebakaran pasar Tanah Abang. Kasus ini berbuntut ke pengadilan. Dalam sejarah pers Indonesia, terdapat nama besar antara lain Mochtar Lubis yang bukan hanya sekali dijebloskan ke penjara oleh pemerintah yang berkuasa. Baik Soekarno maupun Soeharto pernah menghukumnya.

Begitulah dunia wartawan. Keras, menegangkan, dan menyerempet bahaya, tetapi juga mengasyikkan. Pada umumnya, wartawan adalah orang baik yang mencintai pekerjaannya dan tak kenal waktu. Jam kerjanya bisa saja 24 jam sehari. Panggilan tugas bisa datang tiba-tiba yang artinya bisa mengorbankan waktu bersama keluarga. Bahkan, kadang-kadang ia harus bekerja di tempat bahaya atau terancam bahaya.

Wartawan harus siap memburu berita di mana pun dan kapan pun. Maka itu, bagi orang yang ingin bekerja nyaman, enak, dan berangkat pagi pulang

sore, jangan menjadi wartawan. Wartawan adalah suatu profesi yang penuh tanggung jawab dan risiko. Pekerjaan ini menuntut idealisme dan ketanggungan. Wartawan harus siap mental dan fisik.

Fungsi dan tanggung jawab seorang wartawan tidak enteng. Karena itu, syarat-syarat menjadi wartawan tidak ringan. Tidak semua orang bisa melaksanakannya dan tidak semua orang bisa menjadi wartawan. Lalu, apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi wartawan yang baik? Menurut Peter Game, wartawan Australia, syarat yang diperlukan (Mariani *et al*, 2006: 1.13):

1. kecerdasan,
2. kewaspadaan,
3. rasa ingin tahu yang besar,
4. perhatian yang besar terhadap masyarakat, terhadap apa yang mereka lakukan, dan apa yang dilakukan orang terhadap mereka,
5. akal yang panjang (tidak mudah putus asa),
6. kepekaan terhadap ketidakadilan,
7. memiliki keberanian untuk berbeda pendapat dengan pihak yang berkuasa.

Mengenai persyaratan untuk menjadi wartawan yang baik ini, Rosihan Anwar mengemukakan penggunaan bahasa sebagai syarat pertama. Tentu saja yang dimaksud adalah penguasaan bahasa Indonesia, lebih baik lagi penguasaan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Syarat lainnya adalah berpegang pada norma-norma etika dan kesusilaan. Selanjutnya, Rosihan mengatakan, “Seorang reporter mesti bertingkah laku sebagai seorang *gentleman*, berusaha bersikap jujur, terus terang, selalu menghormati dan melindungi sejauh mungkin sumber-sumber beritanya, serta bersikap begitu rupa hingga surat kabar tempat dia bekerja beroleh kepercayaan dan respek sungguh-sungguh dari khalayak ramai (Mariani *et al*, 2006: 1.15).”

Profesionalisme Wartawan Milenium

Menurut Kitty Yanchef (2000) dalam tulisannya *The Professional Journalist of the New Millennium*, memasuki era milenium atau abad ke-21 yang sarat dengan kemajuan teknologi, profesionalisme wartawan membutuhkan multikompetensi. Karakteristik performanya menekankan kekuatan penulisan dan kemampuan oral, ketekunan kerja, serta kepemilikan

dasar pengetahuan yang mengombinasikan aplikasi lintas disiplin yang dibutuhkan untuk memasok informasi di dunia profesional industri.

Untuk itu, ia mengajukan sepuluh kemampuan wartawan profesional yang terdiri atas (Santana K, 2005: 207—208):

1. *writing competencies*,
2. *oral performance competencies*,
3. *research and investigative competencies*,
4. *broad-based knowledge competencies*,
5. *web-based competencies*,
6. *audiovisual competencies*,
7. *skill-based computer application competencies*,
8. *ethic competencies*,
9. *legal competencies*,
10. *career competencies*.

Writing competencies adalah kapasitas untuk melaporkan secara akurat, jelas, kredibel, dan dapat diandalkan. Itu adalah kemampuan menulis yang mudah dipahami pembaca. Laporan berita bagi surat kabar *online* memiliki pembaca yang bersifat internasional. Maka itu, kemampuan di sini terkait juga dengan penguasaan dalam memakai tata bahasa, kata-kata, dan tanda-tanda baca serta pemahaman terhadap kosakata (*vocabulary*) paragraf-paragraf, *lead*, kelengkapan data-data sumber berita, dan sebagainya.

Oral performance competencies adalah kemampuan menyampaikan pengertian, respons yang baik, percaya diri, dan bertanggung jawab. Kemampuan wawancara memerlukan berbagai teknik dan metode tertentu, misalnya ketika mewawancarai anak-anak, kelompok etnik, korban kekerasan, dan sebagainya. Selain itu, wartawan perlu mempunyai kemampuan mengenali nuansa dari wacana publik.

Research and investigative competencies adalah kemampuan menyiapkan berbagai bahan, pengembangan, akurasi, akurasi kisah, atau mengidentifikasi topik-topik potensial melalui sumber kepustakaan, referensi virtual *online*, dan catatan-catatan publik.

Broad-based knowledge competencies adalah kemampuan memiliki pengetahuan dasar, seperti ekonomi, statistik, matematika, sejarah, sains, perawatan kesehatan, dan struktur pemerintahan. Dunia kewartawan mensyaratkan proses belajar seumur hidup dan keluasan lintas disiplin.

Web-based competencies adalah kemampuan menguasai internet, *e-mail*, *mailing list*, *newsgoup*, dan pemberitaan dalam format *on the web*. Khususnya, pemberitaan yang bersifat *breaking news and information* yang memiliki nilai autentik, akurasi, dan reliabilitas informasi *on the web*.

Audiovisual competencies adalah kemampuan menggunakan peralatan, seperti kamera 35 mm, kamera video, *men-scan* foto dalam komputer, serta *audio tape recorder*.

Skill-based computer application competencies adalah kemampuan mengaplikasikan komputer dalam kegiatan melaporkan pemberitaan, seperti *word processing*, pengembangan *database* (terutama bagi *investigative reports*), dan aplikasi multimedia, termasuk *pagemaker*, *quark xpress*, *printshop*, dan sebagainya bagi kerja kewartawannya.

Ethic competencies adalah kemampuan memahami tanggung jawab profesi, seperti kode etik, pertimbangan nilai-nilai etika, pelanggaran, dan plagiarisme.

Legal competencies adalah kemampuan memahami ihwal undang-undang kebebasan berpendapat, seperti yang tercantum dalam *the Freedom of International Act* (FOIA), *the First Amendment*, hak cipta, dan sebagainya, serta kaitannya dengan tugas-tugas profesi kewartawanan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Career competencies adalah kemampuan memahami dunia karier profesional dalam jurnalisme. Kemampuan bekerja dalam manajemen pers dan bersikap positif dalam kerja peliputan, termasuk aspek-aspek dari komponen manajerial pasar, analisis kelayakan, *memproduksi dan mengedit berita*, serta keterlibatan dalam berbagai asosiasi dan jaringan profesional dari dunia jurnalisme.

D. KODE ETIK JURNALISTIK

Di era Orde Baru, wartawan hanya memiliki satu organisasi, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang amat sakti. Wartawan yang tidak punya kartu PWI tidak punya akses liputan ke Istana Negara atau sumber-sumber tertentu lainnya. Setiap calon pemimpin redaksi harus mendapat rekomendasi dari PWI. Apabila karena suatu hal pemimpin redaksi dianggap menyalahi etika atau bersalah dalam mempraktikkan jurnalisme, keanggotaan PWI-nya dapat dicabut dan otomatis ia kehilangan jabatan.

PWI lahir dalam Kongres I di Solo, 9 Februari 1946. Kemudian, dalam Kongres II di Malang, 1947, kode etik jurnalistik mulai dirumuskan meskipun baru disahkan pada Kongres IV tahun 1950 di Surabaya.

Pada era Reformasi, tahun 1999, tercatat ada 26 organisasi wartawan. Mereka berkumpul di Bandung dan menyepakati Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) pada 6 Agustus 1999 meskipun satu organisasi yang tidak menandatangani. Satu tahun kemudian, sesuai UU 40/1999 Pasal 7 ayat 2, Dewan Pers menyetujui KEWI untuk dipakai bersama.

KEWI yang memuat tujuh butir kemudian disempurnakan. Beberapa aspek masih dianggap lemah, misalnya siapa yang mengawasi pelaksanaan KEWI. Tanpa pengawasan, tentu KEWI tidak bisa mengikat kuat. Masih menjadi perdebatan, apakah Dewan Pers perlu membentuk dewan kehormatan. Di sisi lain, pers tumbuh seperti jamur di musim hujan, tidak ada persyaratan penting apa pun untuk duduk menjadi pemimpin redaksi. Banyak pula keluhan masyarakat tentang wartawan yang melenceng dari etika.

KEWI disempurnakan menjadi Kode Etik Jurnalistik 2006. Sejak kode etik ini muncul, KEWI tidak berlaku lagi. “Kode etik jurnalistik ditandatangani di Jakarta, 14 Maret 2006, oleh 29 organisasi wartawan Indonesia dan ditandatangani pula oleh pihak yang mengawasi pelaksanaannya, yakni Dewan Pers (diwakili anggotanya, Hinca Panjaitan) dan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (diwakili Wakil Ketua KPI Pusat S. Sinansari Ecip). Untuk lembaga penyiaran (media elektronika), KPI atas perintah UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran membuat semacam kode etik yang disebut pedoman perilaku penyiaran (P3). Dalam P3, disebutkan bahwa untuk kegiatan jurnalisme penyiaran berlaku juga kode etik jurnalistik (Ecip, 2007: 119).

KEJ (2006) terdiri atas 11 pasal. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran dilakukan oleh organisasi wartawan atau perusahaan pers. Berikut secara ringkas (tanpa memuat bagian penafsiran) KEJ itu.

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas ataupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan risiko yang dapat dihadapi wartawan dalam melaksanakan pekerjaannya!
- 2) Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi wartawan yang baik?
- 3) Sebutkanlah 10 kemampuan yang mesti dimiliki wartawan profesional!
- 4) Jelaskan perihal kode etik jurnalistik!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Berikut ini adalah pengalaman dan risiko kerja yang dihadapi wartawan.
 - a. Fotografer C. Sukma dari majalah *Ummat* dianiaya tentara dan dirusak kameranya saat meliput kerusuhan pada 27 Juli 1996 di depan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Jalan Diponegoro, Jakarta.
 - b. Pada 29 Desember 2003, reporter RCTI Sorri Ersya Siregar tewas tertembak ketika terjadi kontak senjata antara tentara dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ersya dan juru kamera Fery Suntoro diculik oleh GAM pada 29 Juni, lalu berbulan-bulan tak ada beritanya. Ersya tewas, tetapi Ferry Suntoro dibebaskan GAM pada 16 Mei 2004.
 - c. Reporter Metro TV Meutia Hafid bersama *cameraman* Budiyanto menjadi sandera kelompok Mujahidin (*Jaish al-Mujahideen*) ketika ditugaskan meliput medan perang di Irak. Selama 168 jam dalam rentang waktu 15-22 Februari 2005, mereka harus hidup di tengah

gurun. Drama penyanderaan ini berakhir setelah Presiden SBY berpidato secara resmi meminta pembebasan Meutia dan Budi yang disiarkan televisi internasional.

- 2) Menurut Peter Game, wartawan Australia, syarat yang diperlukan untuk menjadi wartawan yang baik:
 - a. kecerdasan,
 - b. kewaspadaan,
 - c. rasa ingin tahu yang besar,
 - d. perhatian yang besar terhadap masyarakat, terhadap apa yang mereka lakukan, dan apa yang dilakukan orang terhadap mereka,
 - e. akal yang panjang (tidak mudah putus asa),
 - f. kepekaan terhadap ketidakadilan,
 - g. memiliki keberanian untuk berbeda pendapat dengan pihak yang berkuasa.

- 3) Sepuluh kemampuan wartawan profesional terdiri atas:
 - a. *writing competencies*,
 - b. *oral performance competencies*,
 - c. *research an investigative competencies*,
 - d. *broad-based knowledge competencies*,
 - e. *web-based competencies*,
 - f. *audiovisual competencies*,
 - g. *skill-based computer application competencies*,
 - h. *ethic competencies*,
 - i. *legal competencies*,
 - j. *career competencies*.

- 4) Kode etik jurnalistik ditandatangani di Jakarta pada 14 Maret 2006 oleh 29 organisasi wartawan Indonesia dan ditandatangani pula oleh pihak yang mengawasi pelaksanaannya, yakni Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggarannya dilakukan oleh organisasi wartawan atau perusahaan pers.



RANGKUMAN

Menjadi wartawan yang profesional itu tidak mudah. Diperlukan syarat-syarat yang berat, yakni kecerdasan, kewaspadaan, rasa ingin tahu yang besar, perhatian yang besar terhadap masyarakat (terhadap apa yang mereka lakukan dan apa yang dilakukan orang terhadap mereka), akal yang panjang (tidak mudah putus asa), kepekaan terhadap ketidakadilan, dan memiliki keberanian untuk berbeda pendapat dengan pihak yang berkuasa.

Bahkan, pada abad ke-21 yang sarat dengan kemajuan teknologi ini, profesionalisme wartawan memerlukan multikompetensi serta pemahaman lintas disiplin dan menguasai teknologi. Selain syarat tersebut, wartawan juga mesti siap menghadapi risiko bahwa jiwanya dan mungkin keluarganya bisa terancam.

Di tengah pujian akan peran dan tugas mulia seorang wartawan, iklim pers di Indonesia untuk sekian lama masih sering diwarnai berita-berita miring. Profesi ini sering tercoreng oleh orang yang mengaku wartawan atau wartawan sungguhan, tetapi tidak menjunjung tinggi etika jurnalistik. Kode etik jurnalistik yang dirumuskan tahun 2006 dan kini menjadi payung etika wartawan Indonesia belum terlaksana dengan baik. Wacana standarisasi profesi wartawan pun mengemuka sebagai salah satu solusi.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Syarat umum menjadi wartawan adalah
 - A. memiliki kecerdasan dan kewaspadaan
 - B. memiliki rasa ingin tahu yang besar dan perhatian terhadap masyarakat
 - C. peka terhadap ketidakadilan dan berani berbeda pendapat dengan penguasa
 - D. semua benar

- 2) Untuk menjadi wartawan profesional pada abad ini, diperlukan kemampuan dasar ekonomi, statistik, matematika, sejarah, sains,

perawatan kesehatan, dan struktur pemerintahan. Kemampuan dasar ini disebut

- A. *writing competencies*
- B. *broad-based knowledge competencies*
- C. *skill-based computer application competencies*
- D. *ethic competencies*

3) Seperangkat peraturan tentang etika atau moral untuk mengatur proses kerja wartawan dalam mencari berita adalah

- A. etika jurnalistik
- B. etika pemberitaan
- C. pers independen
- D. kode etik jurnalistik

4) Hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh media, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain, disebut

- A. hak koreksi
- B. hak jawab
- C. hak ingkar
- D. hak proporsional

5) Masalah yang sering muncul berkaitan dengan profesionalisme wartawan pada zaman sekarang dibanding zaman dulu sebelum dasawarsa 1960-an adalah

- A. wartawan zaman sekarang mengutamakan idealisme
- B. wartawan zaman sekarang kurang berpendidikan
- C. wartawan zaman sekarang mengutamakan bisnis
- D. wartawan zaman sekarang terlalu berpihak pada partai yang didukungnya

6) Wartawan yang tidak menjadi staf tetap salah satu surat kabar, melainkan hanya menyumbangkan tulisan mewakili beberapa penerbit pers, disebut

- A. redaktur
- B. *freelancer*

- C. wartawan tanpa surat kabar
 - D. koresponden daerah
- 7) Kemampuan menyiapkan berbagai bahan, pengembangan, akurasi, atau mengidentifikasi topik-topik potensial melalui sumber kepustakaan, referensi virtual *online*, dan catatan-catatan publik disebut
- A. *ethic competencies*
 - B. *oral performance competencies*
 - C. *writing competencies*
 - D. *research and investigative competencies*
- 8) Kemampuan menyampaikan pengertian, respons yang baik, percaya diri, dan bertanggung jawab adalah
- A. *ethic competencies*
 - B. *oral performance competencies*
 - C. *writing competencies*
 - D. *research and investigative competencies*
- 9) Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Ketentuan tersebut tercantum dalam
- A. kode etik wartawan Indonesia
 - B. kode etik jurnalistik
 - C. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999
 - D. anggaran dasar/anggaran rumah tangga Dewan Pers
- 10) Kelebihan media cetak dibanding media elektronik adalah:
- A. dapat dibaca kapan saja
 - B. dapat dibaca berulang-ulang
 - C. mudah dibawa
 - D. semua benar

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B. Hadiah Pulitzer (*Pulitzer Prize*) diberikan sejak 1917 untuk menghormati jasa-jasa Joseph Pulitzer. Ini adalah lambang kebanggaan dunia jurnalistik, baik untuk tulisan/berita, foto, maupun institusi pers. Joseph Pulitzer adalah jurnalis dan penerbit surat kabar. Ia mendirikan *St.Louis Post-Dispatch* dan membeli *New York World*. Pulitzer mewariskan uang ke Columbia University saat kematiannya pada tahun 1911. Sebagian dari wasiatnya digunakan untuk membangun sebuah sekolah jurnalisme di universitas itu pada tahun 1912.
- 2) A. Jurnalistik berasal dari kata *acta diurna*. Kata *diurnal* dalam bahasa Latin berarti “harian” atau “setiap hari”. Kata ini diadopsi ke bahasa Prancis menjadi *du jour* dan bahasa Inggris *journal* yang berarti “hari”, “catatan harian”, atau “laporan”. Dari kata *diurnarii*, muncul kata *diurnalis* dan *journalist* (wartawan).
- 3) D. Sumber informasi karya jurnalisme adalah peristiwa (*events*) atau pendapat (opini) yang mengandung nilai berita, masalah hangat (*current affair*), dan masalah unik yang ada dalam masyarakat. Sumber karya jurnalisme ini biasanya disebut peristiwa/fakta atau pendapat.
- 4) C. Ada dua cara dalam penulisan berita atau artikel di koran dan majalah, yakni sistem anonim (anonimitas) dan *by line*. Prinsip anonimitas terjadi karena adanya anggapan bahwa dengan tidak disebutkan nama wartawan atau penulis editorial/kolom, hal itu akan menjamin keamanan para sumber berita dan informan yang dipakai. Selain itu, juga ada tanggung jawab apabila terjadi sesuatu yang tak diinginkan sudah diambil alih surat kabar sebagai badan hukum.
- 5) D. Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers Pasal 1 ayat 1.
- 6) A. Konvergensi berasal dari kata *convergence* yang maknanya bertemu di satu jalur. Konvergensi media adalah bergabungnya atau terkombinasinya berbagai jenis media yang sebelumnya dianggap terpisah dan berbeda (cetak, elektronik, dan *online*) dalam sebuah media tunggal. Ini berkat kemajuan teknologi, seperti dengan sebuah

hanphone, seseorang bisa membaca koran, menonton televisi, mendengar radio, dan lain-lain.

- 7) D. *Straight news* adalah berita lempang dan paling sering ditemui di koran karena melaporkan kejadian di level permukaan secara cepat. Berita ini disebut juga *hard news* atau *spot news*.
- 8) A. *Feature news* atau berita kisah adalah berita yang seperti cerita atau kisah hingga menarik. *Feature* banyak ditemukan di majalah/tabloid dan beberapa koran. Sebagian tulisan bergeser bisa diolah menjadi *feature*. Dengan *feature*, deskripsi tulisan menjadi hidup.
- 9) C. Pada masa kekuasaan Presiden Soeharto, terjadi tiga pemberedelan media massa. Pertama, meletusnya demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan pada 15 Januari 1974. Kedua, pada 1982, *Tempo* diberedel akibat mengulas kampanye Golkar yang rusuh. Ketiga, pada 21 Juni 1994, *Tempo* kembali diberedel bersama majalah *Editor* dan tabloid politik *DeTik*.
- 10) B. Max Weber adalah orang pertama yang melakukan penelitian sosiologis terhadap problem persuratkabaran.

Tes Formatif 2

- 1) D. Pilar atau kekuatan keempat demokrasi itu adalah julukan yang diberikan kepada pers. Disebut demikian karena pers mempunyai kekuatan politik dan opini yang mampu memengaruhi masyarakat umum. Tiga pilar demokrasi yang lain adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- 2) D. Pers mempunyai empat fungsi. Fungsi informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Selain itu, masih ada fungsi yang mesti diemban pers, yaitu fungsi mendidik (tanggung jawab media dalam upaya mencerdaskan masyarakat), fungsi menghibur (memberi daya tarik media agar diminati masyarakat), dan fungsi koreksi atau kontrol sosial (terutama menyangkut kebijakan pemerintah dan penyimpangan di masyarakat).
- 3) B. Pers dalam arti sempit adalah terbatas hanya pada kegiatan publikasi yang menggunakan media cetak, termasuk buku. Pers dalam arti luas mencakup seluruh kegiatan publikasi media apa pun bentuknya.
- 4) C. Pemimpin redaksi adalah orang yang bertanggung jawab pada isi pemberitaan, baik tanggung jawabnya kepada pemimpin umum maupun kepada hukum negara dan kode etik jurnalistik.

- 5) D. Wartawan yang sering salah menyampaikan data berarti wartawan tersebut tidak menjalankan elemen disiplin verifikasi. Wartawan yang demikian tergolong ceroboh, tidak cermat, malas, dan mudah putus asa.
- 6) D. Gambaran tentang hati nurani jurnalisme ditegaskan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel pada 2001 dalam karyanya yang fenomenal *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and The Public Should Expect*. Kemudian, pada 2004, diterjemahkan menjadi *Sembilan Elemen Jurnalisme: Apa yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan Diharapkan Publik*.
- 7) D. Jurnalisme adalah kegiatan mencari, menggali, mengumpulkan, mengolah, memuat, dan menyebarkan berita, sedangkan pers adalah lembaga yang melakukan kegiatan jurnalisme.
- 8) B. Dalam Undang-Undang Nomor 40/1999 Pasal 4 ayat 2, disebutkan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.
- 9) A. *Views* adalah pandangan atau pendapat mengenai suatu masalah atau peristiwa. Di media, *views* ini muncul dalam bentuk editorial, *special article*, *column*, dan *feature article*. Yang termasuk dalam *views* adalah karikatur, pojok humor, dan surat pembaca.
- 10) C. Amerika Serikat menggunakan kata jurnalistik (meski Amerika menggunakan *journalism*). Kata publisistik tidak dikenal di sana.

Tes Formatif 3

- 1) D. Seseorang yang ingin menjadi wartawan harus memiliki kecerdasan, kewaspadaan, rasa ingin tahu yang besar, perhatian yang besar terhadap masyarakat (terhadap apa yang mereka lakukan dan apa yang dilakukan orang terhadap mereka), akal yang panjang (tidak mudah putus asa), kepekaan terhadap ketidakadilan, dan memiliki keberanian untuk berbeda pendapat dengan pihak yang berkuasa.
- 2) B. *Broad-based knowledge competencies* adalah kemampuan memiliki pengetahuan dasar, seperti ekonomi, statistik, matematika, sejarah, sains, perawatan kesehatan, dan struktur pemerintahan. Dunia kewartawanan mensyaratkan proses belajar seumur hidup dan keluasan lintas disiplin.

- 3) D. Kode artinya suatu program pengaturan. Etik artinya etika atau moral. Jurnalistik, yakni proses/kegiatan pencarian berita. Jadi, makna kode etik jurnalistik adalah seperangkat peraturan tentang etika atau moral untuk mengatur proses kerja wartawan dalam mencari berita.
- 4) A. Menurut penafsiran Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik sebagai berikut.
 - 1) Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan media berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
 - 2) Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh media, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
 - 3) Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.
- 5) C. Keluhan orang adalah wartawan sekarang tidak seperti wartawan tempo dulu. Wartawan tempo dulu melaksanakan tugas selalu mengedepankan idealis ketimbang bisnis. Wartawan sekarang kondisinya tentu jauh berbeda. Faktor bisnis lebih banyak mendominasi.
- 6) B. Wartawan lepas yang tidak menjadi staf tetap salah satu surat kabar, tetapi hanya menyumbangkan tulisan mewakili beberapa penerbit pers sering disebut *freelancer*.
- 7) D. *Research and investigative competencies* adalah kemampuan menyiapkan berbagai bahan, pengembangan, akurasi, akurasi kisah, atau mengidentifikasi topik-topik potensial melalui sumber kepustakaan, referensi virtual *online*, dan catatan-catatan publik.
- 8) B. *Oral performance competencies*, yaitu kemampuan menyampaikan pengertian, respons yang baik, percaya diri, dan bertanggung jawab.
- 9) C. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 3.
- 10) D. Kelebihan media cetak adalah berita yang disiarkannya dapat dibaca kapan saja dan secara berulang-ulang, mudah dibawa, serta dapat didokumentasikan. Isinya lebih mendalam dan kaya data.

Daftar Pustaka

- Ecip, S. Sinansari. (2007). *Jurnalisme Mutakhir*. Jakarta: Penerbit Republika.
- Kertapati, Ton. (1986). *Dasar-dasar Publisistik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kovach, Bill & Tom Rosenstiel. (2001). *The Elements of Journalism: What Newspeople Should and Public Should Expect*. New York: Crwon Publisher.
- Mariani, Ina Ratna, *et al.* (2006). *Materi Pokok Teknik Mencari dan Menulis Berita*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Muhtadi, Asep Saeful. (1999). *Jurnalistik: Pendekatan Teori dan Praktik*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Rachmadi, F. (1990). *Perbandingan Sistem Pers*. Jakarta: Gramedia.
- Santana K, Septiawan. (2005). *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sumadiria, AS Haris. (2005). *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature: Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Bandung: Sempiosa Rekatama Media.
- Wibisono, Christianto (*ed.*). (1991). *Pengetahuan Dasar Jurnalistik*. Jakarta: Penerbit Media Sejahtera.